

**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA DALAM
SOSIALISASI POLITIK PEMILU 2024**

(Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial



Disusun Oleh:

Dirman Muharom Setia

1198030066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN SOSIOLOGI

BANDUNG

2023

ABSTRAK

Dirman Muharom Setia (1198030066): *"Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)"*.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan melihat bagaimana peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan dan merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia untuk mencetak pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Ada begitu banyak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia dan masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda dalam masyarakat, beberapa di antaranya fokus pada pendidikan, yang lainnya fokus pada isu-isu sosial dan politik, dan ada juga yang fokus pada kesejahteraan pemuda, dan diantara yang lainnya ada yang berperan dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik.

Penelitian ini ingin mengkaji peran yang dimainkan oleh salah satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan juga Organisasi Kemahasiswaan yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat. Lebih jauhnya ingin mengetahui bagaimana pemikiran dan juga gerakan dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan Sosialisasi Politik yang dilakukan dengan dihadapkan pada momentum Pemilu 2024 yang akan datang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Peran dan juga Teori Sosialisasi Politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff (2011) bahwa Sosialisasi politik sebagai proses yang dapat mengarahkan individu untuk lebih memahami sistem politik, yang kemudian menentukan persepsi dan tanggapan mereka mengenai fenomena politik. Suatu sistem politik dapat berupa masukan, kritik ke orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan. Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff adalah membentuk individu dan memelihara sistem politik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan prospektif dan pendekatan induktif. Data dalam penelitian ini dihasilkan dari pengumpulan data primer yang didapatkan dari OKP yang bersangkutan, dimulai dari Ketua Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dan Bidang Politik Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat sebagai informan utama, Ketua Umum ataupun Ketua Pimpinan Pusat Hima Persis sebagai informan kunci. Untuk memvalidasi datanya, KPU Jawa Barat, Aktivist/Tokoh Masyarakat, dan juga Kader Hima Persis yang Aktif ditambahkan sebagai informan tambahan. Serta dilengkapi data sekunder seperti referensi buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan juga reduksi data.

Hasil penelitian menunjukkan pemikiran Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan sosialisasi politik pemilu 2024 adalah bagian dari trilogi Hima Persis yaitu intelektualitas, perubahan iklim politik, dan perubahan sosial. Gerakan Sosialisasi Politik yang dilakukan tidak boleh jauh-jauh dari model dan gerakan khas mahasiswa, yaitu kekuatan intelektual dan politik moral. Sosialisasi Politik yang dilakukan Hima Persis terkait dengan Pemilu 2024, tentunya untuk mengantisipasi dan mengkampanyekan agar praktik-praktik ataupun isu yang berkembang tidak secara bebas mempengaruhi kader dan juga masyarakat umum dan juga untuk menjaga kondusifitas serta stabilitas.

Kata Kunci: Hima Persis, Sosialisasi Politik, OKP, Pemilu

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA DALAM
SOSIALISASI POLITIK PEMILU 2024
(STUDI DESKRIPTIF PIMPINAN WILAYAH HIMA PERSIS JAWA
BARAT)**

Oleh:

DIRMAN MUHAROM SETIA

NIM. 1198030066

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hikmat, M.Ag

NIP. 196101061992031002

Dedeh Kurniasari, M.Ag

NIP. 197503021999032001

Mengetahui,

Dekan FISIP,

Ketua Jurusan,

Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D

NIP. 197305271998031001

Dr. Kustana, M.Si. CSP

NIP. 197208062007101004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *“Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)”* pada Sidang Munaqosah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, pada tanggal 23 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Sosiologi.

Bandung, 23 Agustus 2023

Sidang Munaqosah
Ketua Majelis, Sekretaris Majelis,

Dr. H. Moh Dulkiah, M.Si
NIP. 197509242007101001

H. Wawan Setiawan Abdillah, M.Ag
NIP. 198002072011011004



Anggota,

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Dr. Jajang A Rohmana, M.Ag
NIP. 19760609200501108

Dr. Nurmawan, M.Ag
NIP. 196905082006041001

LEMBAR PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dirman Muharom Setia
Nomor Induk Mahasiswa : 1198030066
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 06 April 2000
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi yang berjudul “*Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)*” merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, terindikasi plagiarisme, dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Bandung, 10 Agustus 2023

Dirman Muharom Setia
NIM 1198030066

RIWAYAT HIDUP



Dirman Muharom Setia, lahir di Kabupaten Bandung pada hari Kamis, tanggal 6 April tahun 2000 adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, yang terlahir dari pasangan ayahanda Wawan Setiawan dan ibunda Noneng Aminah.

Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SD Linggar V pada tahun 2007 dan lulus tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Pesantren Persatuan Islam 24 Rancaekek dan tamat pada tahun 2017.

Setelah lulus dari MTs, penulis melanjutkan MA di sekolah yang sama dan tamat di tahun 2019. Pada tahun yang sama pula penulis berhasil terdaftar dan melanjutkan studi di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Sejak awal kuliah sampai lulus, penulis aktif diberbagai organisasi kampus, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Dema Fisip. Penulis juga aktif di organisasi ekstra kampus, yaitu Pimpinan Komisariat Hima Persis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diamanahi Bendahara Umum untuk satu periode jabatan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul ***“Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)”***. Terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga, orang terkasih, teman-teman serta pihak-pihak terkait yang membantu baik materil maupun immateril dalam proses yang sungguh berat ini.

MOTTO HIDUP

Optimis realistik.

Hidup bisa jadi pengatur, diatur, dan teratur.

Jangan hanya ber-supaya, tapi harus ber-upaya.

Kehidupan memang jahat, tapi orang hebat akan terinspirasi bukan terintimidasi.

Tidak ada margin dalam bermimpi.

Menjadi manusia harus ber-prinsip dan juga ber-*friendship*.

Jangan sampai keberadaan saya tidak mengenapkan, ketiadaannya pun tidak
menganjilkan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur semoga senantiasa kita panjatkan kepada dzat yang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dengan penuh ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.

Bagi penulis skripsi yang berjudul ***“Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)”*** ini merupakan tugas yang tidak mudah. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan penulis sendiri dan faktor-faktor lainnya.

Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tentulah karena beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada orang tua, kakak, serta keluarga tercinta yang senantiasa mensupport penulis dalam menyusun skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Prof. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Dr. Moh. Dulkiah, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
5. Dr. Muhamad Zuldin, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
6. Dr. Kustana, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Dr. Dede Syarif, S.Sos., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Mohammad Taufiq Rahman, MA., Ph.D., CISE., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan nasehat, saran, dorongan dan inspirasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Dr. Hikmat, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang memberikan nasihat, saran, dorongan dan inspirasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Dedeh Kurniasari, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang senantiasa memberikan nasihat, saran, dorongan dan inspirasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Hima Persis, yang menjadi tempat ataupun ruang aktualisasi bagi penulis.

12. Pemuda Persis, yang menjadi tempat ataupun ruang aktualisasi bagi penulis.
13. Sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Orang-orang spesial yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan luka sekaligus dorongan, bantuan, serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain iringan do'a yang tulus dan ikhlas, semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Tidak lupa juga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya penulis kedepannya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khalayak banyak pada umumnya.

Aamiin.

Bandung, 10 Agustus 2023

Dirman Muharom Setia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Berpikir	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Konsep Peran.....	15
2.3 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).....	18
2.3.1 Pengertian OKP	18
2.4 Teori Sosialisasi Politik.....	19
2.4.1 Definisi Sosialisasi Politik.....	19
2.4.2 Metode Sosialisasi Politik.....	22
2.4.3 Agen-agen Sosialisasi Politik	23
2.4.4 Tujuan Sosialisasi Politik	25
2.5 Pemilihan Umum.....	26
2.5.1 Definisi Pemilu	26
2.5.2 Sistem Pemilu	28

2.5.3 Pemilu di Indonesia	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Teknik Analisis Data	39
3.5 Tempat dan Waktu Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Kondisi Objektif Penelitian	42
4.1.1 Sejarah Hima Persis	42
4.1.2 Peran Hima Persis	51
4.1.3 Visi Hima Persis	52
4.2 Hasil Penelitian.....	54
4.2.1 Peran Hima Persis dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024	54
4.2.2 Pemikiran Hima Persis terkait Sosialisasi Politik Pemilu 2024	56
4.2.3 Gerakan Hima Persis terkait Sosialisasi Politik Pemilu 2024	61
4.3 Pembahasan	63
4.3.1 Implikasi OKP dengan Politik	63
4.3.2 Analisis menggunakan Teori Sosialisasi Politik.....	72
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi merupakan suatu tempat atau wadah berkumpul bagi sekelompok orang untuk yang umumnya itu terkendali, terarah, dan bekerja sama secara rasional dan teratur untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Organisasi tempat yang tepat bagi generasi muda, karena di organisasi inilah lahir perpaduan ide-ide yang melahirkan konsep pembangunan yang hebat untuk kedepannya.

Peran Organisasi Pemuda jauh sebelum Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kaum muda sudah menunjukkan perannya. Dalam perjalanannya, tinta emas tertulis dalam sejarah panjang menunjukkan betapa besar kontribusi pemuda untuk bangsa dan negara. Sumbangsih itu hadir dari kelompok pemuda bangsa yang memiliki visi dan misi yang sama, mereka kemudian berkumpul menjadi organisasi kepemudaan yang berjuang untuk membebaskan diri dan masyarakat dari segala bentuk penjajahan.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia lahir karena cita-cita kemerdekaan. Kemerdekaan dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai hak segala bangsa. Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa ini menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan berdaulat. Tentu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang lahir dari rahim ke-Indonesiaan, ingin mendukung nasionalisme seperti yang diharapkan sedari awal. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam konteks

Indonesia mempunyai sejarah berkaitan dengan ruang dan waktu yang terbentang cukup panjang dengan sumbangsih, dedikasi, dan kontribusi bagi bangsa ini.

Sebelum kemerdekaan ada beberapa organisasi kepemudaan diantaranya adalah Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lain sebagainya. Demikian juga sekarang, banyak sekali Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pemuda Pancasila, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, termasuk Hima Persis.

Secara sederhana, sosialisasi bisa dipahami sebagai proses menanamkan atau mentransfer budaya atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Beberapa dari sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori peran. Dalam prosesnya mengajarkan peran-peran yang harus dipenuhi oleh seseorang. Politik secara garis besarnya adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang dimanifestasikan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam kehidupan bernegara.

Sosialisasi politik sebagai proses yang menunjukkan sikap atau perilaku politik yang diperoleh kelompok atau masyarakat. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai pewarisan pengetahuan, nilai, dan pandangan politik dari keluarga, sekoah, teman, dan sarana sosialisasi politik lainnya kepada seorang individu tau warga negara. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah proses pemberian pemahaman sehingga nantinya akan ada proses dari pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat ataupun individu.

Secara garis besar, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda merupakan tempat yang ideal untuk membina pemimpin masa depan dengan menciptakan pola pikir dan karakter yang ideal. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Indonesia bisa memberikan pengaruh yang cukup signifikan karena bisa menjelma menjadi salah satu kekuatan sosial-politik di tengah-tengah masyarakat. Terbentuknya organisasi kepemudaan di Indonesia bermacam-macam ada yang dilandaskan pada kesadaran demokrasi maupun tidak, ada juga yang terbentuk dengan basis intelektual, moral, kedaerahan, ataupun karena ada unsur kepentingan politik partai dan lain sebagainya.

Sebagai organisasi yang berisikan pemuda-pemuda, keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam menumbuhkan kesadaran politik di segmentasi anak muda saat ini sangat berpengaruh. Hal itu kemudian harus dijadikan sarana untuk menarik generasi muda baik sebagai pemilih atau sebagai warga negara untuk menjalankan tugasnya dengan bijak mensukseskan politik yang ada di Indonesia.

Untuk sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum atau pemilu merupakan instrument sangat penting bagi negara. Sebuah pemilu biasanya ajang untuk melakukan penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang menang dan terpilih bisa dikatakan sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Dalam Pemilihan Umum, pemilih dalam suatu Pemilu disebut konstituen, dan ke merekalah para peserta Pemilu memaparkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditetapkan, menjelang hari pengambilan suara. Setelah pengambilan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilihan umum pada masa Orde Baru dilaksanakan 6 kali penyelenggaraan pemilu yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dengan menggunakan sistem proporsional. Dari pelaksanaan pemilu tersebut Orde Baru telah berhasil menjalankan pemilihan umum berkala setiap lima tahun sekali kecuali tahun 1977.

Setelah Reformasi ditetapkan di Indonesia sudah lima kali dilakukan pemilihan umum yakni tahun 1999, 2001, 2004, 2009 dan 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejak masa reformasi tersebut konsep politik jauh lebih berbeda dengan masa Orde Baru sebab Reformasi lebih menekankan dalam kehidupan yang demokratis dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada setiap masyarakatnya. Sehingga dalam waktu yang begitu singkat muncul partai politik yang jumlahnya sangat banyak dengan beragam tujuan dan asas partai, basis massa yang mencerminkan kompleksitas kehidupan bangsa Indonesia yang sebenarnya terdiri dari beragam perbedaan.

Hima Persis adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang terdaftar bersama organisasi-organisasi lainnya. Hima Persis merupakan bagian otonom dari ormas Persatuan Islam atau lebih dikenal dengan sebutan Persis. Persis adalah salah satu dari sekian banyaknya ormas Islam di Indonesia. Persis memiliki beberapa bagian otonom selain Hima Persis diantaranya Persatuan Islam Isteri (Persistri), Pemuda Persis, Pemudi Persis, Himi Persis yang menjadi rekan Hima Persis di kampus, dan yang terbaru adalah Ikatan Pelajar Persis (IPP) dan Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI) yang sah menjadi bagian otonom Persis di Mukhtamar terbarunya.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia. Penelitian ini ingin mengkaji peran OKP, dalam hal ini adalah Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat untuk menelusuri berbagai kegiatan yang berangkat dari Pemikiran dan Gerakan yang dilakukan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan sosialisasi politiknya dengan judul ***“Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Deskriptif Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat)”***.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024?

2. Bagaimana pemikiran Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024?
3. Bagaimana gerakan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan Sosialisasi Politik Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan Sosialisasi Politik Pemilu 2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana gerakan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian di atas maka kita mengharapkan kegunaan hasil penelitian yaitu:

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan terkait Peran Organisasi Kepemudaan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024.
2. Meningkatkan kemampuan penulis dalam menganalisis fenomena Sosialisasi Politik dengan menggunakan teori Sosialisasi Politik dan Konsep Peran.

3. Sebagai bahan kajian kepustakaan (*Library Research*) di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan khalayak umum.

1.5 Kerangka Berpikir

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemuda untuk memperjuangkan hak-hak pemuda dan meningkatkan peran serta pemuda dalam masyarakat pembangunan. OKP ini biasanya dibentuk oleh pemuda yang peduli dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dihadapi oleh pemuda. Organisasi ini juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik dan pengembangan keterampilan kepada pemuda. Beberapa OKP juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk mempromosikan pembangunan pemuda dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Saat ini, OKP di Indonesia memiliki peran yang berbeda-beda dalam masyarakat, beberapa di antaranya fokus pada pendidikan, beberapa fokus lainnya pada isu-isu sosial dan politik, dan beberapa fokus lainnya pada kesejahteraan pemuda. Beberapa di antaranya juga berperan dalam sosialisasi politik dan pendidikan politik.

Sosialisasi politik adalah proses yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang politik, sistem politik, dan proses pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi politik sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik dan membuat masyarakat lebih cerdas dan cakap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan politik.

Sosialisasi politik dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan, dan media. Fungsi sosialisasi politik yang utama adalah menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang politik, sistem politik dan proses pemilu kepada masyarakat agar masyarakat dapat membuat pilihan yang tepat dalam pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah pendidikan dan pengembangan keterampilan, partisipasi pemuda dalam pembangunan, kemitrann dan kerjasama, pemberdayaan pemuda, penyelenggaraan program-program, termasuk advokasi perlindungan hak-hak pemuda termasuk fungsi sosialisasi politik.

OKP dapat berperan sebagai advokat bagi pemuda dan menjadi wakil pemuda dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi pemuda kepada pemerintah dan lembaga-lembaga lain. OKP juga dapat berperan dalam memberikan pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan-kegiatan politik.

Pemilihan umum diadakan pertama kali di Indonesia untuk mencari ataupun memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Untuk pemilihan Presiden pada awalnya dipilih langsung oleh MPR. Ciri dari negara yang menganut sistem demokrasi salah satunya adalah dalam pemerintahannya diselenggarakan pemilihan umum secara berkala. Konsep dasar dari negara demokrasi memungkinkan rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi karena demokrasi menempatkan manusia ataupun masyarakat pada tempat dan kapasitas sebagai

pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan asas kedaulatan rakyat.

Hima Persis adalah salah satu OKP dari sekian banyaknya organisasi-organisasi lain di Indonesia. Hima Persis merupakan bagian otonom dari Persatuan Islam (Persis). Persis adalah salah satu dari sekian banyaknya ormas Islam di Indonesia. Sama dengan ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis juga memiliki beberapa bagian otonom selain Hima Persis. Diantaranya adalah Persatuan Islam Isteri (Persistri), Pemuda Persis, Pemudi Persis, Himi Persis yang menjadi rekan Hima Persis di kampus, dan yang terbaru adalah Ikatan Pelajar Persis (IPP) dan Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI).

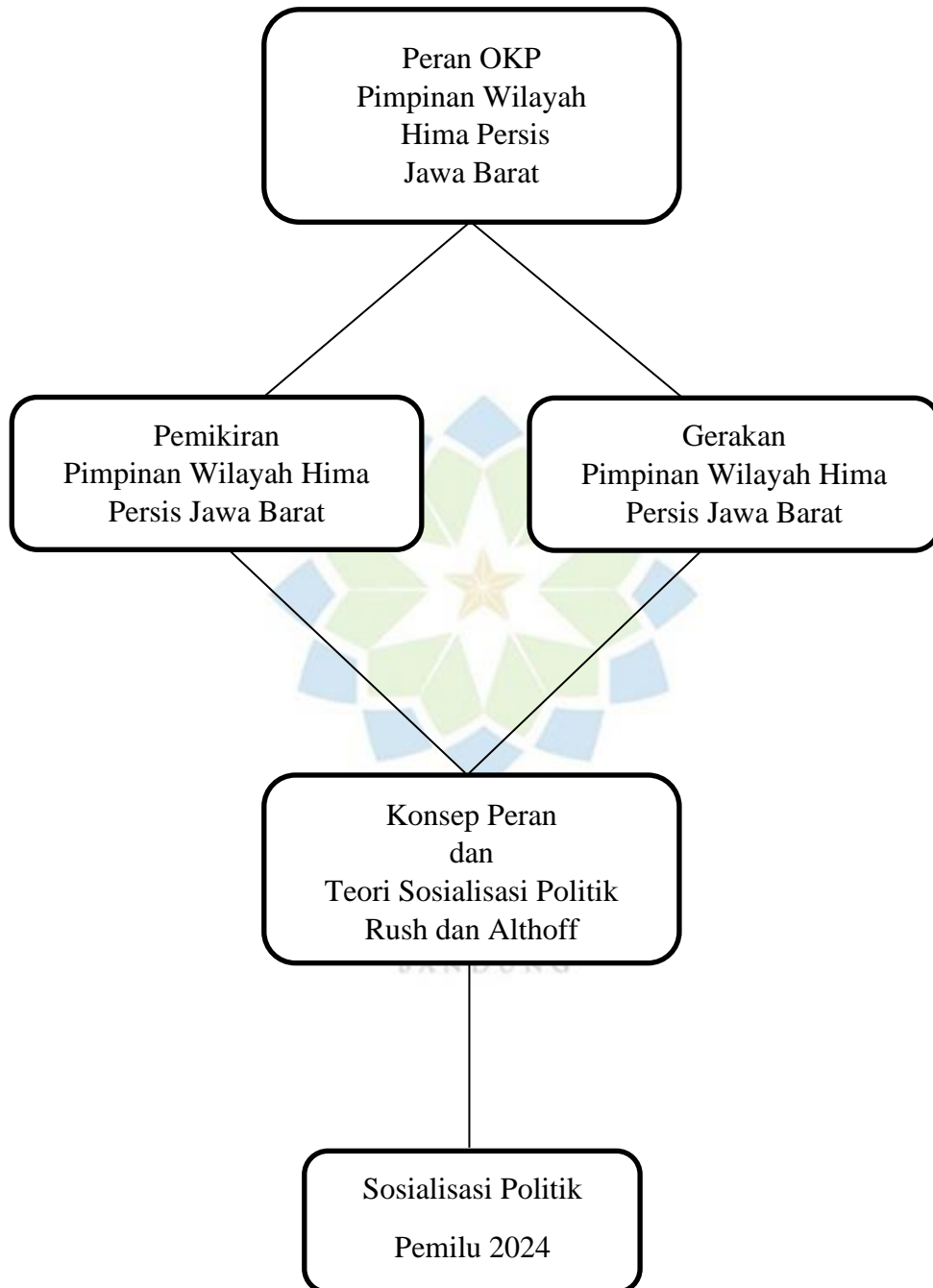
Hima Persis memiliki falsafah gerakan yang dinamakan “Ulul Albab”. Dimana didalamnya ada yang dinamakan transformasi politik atau perubahan politik. Hima Persis memandang dimensi politik dan pemikiran kenegaraan akan menajamkan Ulul Albab dalam bagaimana menata dan mengelola negara dengan benar dan terarah. Menyiratkan terhadap Ulul Albab mengerti akan politik dalam tinjauan syariat (*siyasah syar'iyah*).

Selain karena nash, juga ditopang empat pilar penting. Pertama, secara tabiat tidak ada manusia yang mampu hidup menyendiri. Ia berteman, bergaul, menikah, dan pada tingkat tertingginya ia beserta orang-orang yang sependirian akan membentuk negara. Dari perjalanan hidup manusia demikian, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk politik. Keterlibatan manusia hidup bernegara menandakan bahwa ia *insan siyasiy*.

Kedua, secara sosiologis, tidak ada manusia yang tidak berpolitik. Dalam makna baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, sebagai penguasa atau yang dikuasai, singkatnya sebagai pejabat atau rakyat. Ketiga, universalitas Islam. Bahwa Islam adalah ajaran yang *kaffah* lengkap, mengatur dari hal-hal kecil sampai perihal yang besar, termasuk didalamnya adalah Islam memiliki dimensi politik.

Kemudian yang keempat adalah secara misi Keislaman. Politik adalah ibadah dan merupakan suatu kewajiban, wajib kolektif. Ketiadaan kepemimpinan politik Islami yang menangani persoalan-persoalan masyarakat dapat mengacaukan kehidupan umat. Maka dari itu dirasa penting kewajiban *Imamah* (kepemimpinan politik).

Hima Persis memainkan peranan penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Negara adalah bagian dari aspek sosial dalam kehidupan beragama dalam Islam. Hima Persis hidup ditengah-tengah negara, maka Hima Persis mempunyai bagian dalam menangani persoalan-persoalan publik, termasuk juga dengan sikap-sikap politiknya.



Skema Kerangka Pemikiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu sumber utama penulis untuk meneliti hal ini adalah dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu dengan tema yang sama. Tujuan dari tinjauan Pustaka adalah untuk memahami berbagai hasil penelitian yang sudah dibahas lebih dulu oleh beberapa penulis. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian pada masalah mengenai Sosialisasi Politik, tetapi belum ditemukan penelitian mengenai Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024, dalam hal ini penulis hendak meneliti salah satu OKP di Indonesia yaitu Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat.

Penelitian terdahulu misalnya dilakukan oleh Cherlinda Hestiane Cahyani (2019) mahasiswi jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya yang berjudul *“Sosialisasi Politik Dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018”*. Penelitian ini menempatkan Kesbangpol menjadi subjek dan pemilih pemula menjadi objek penelitian. Dengan kata lain penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran dan pengaruh Kesbangpol terhadap partisipasi pemilih pemula tahun 2018 di Kota Depok. Pada penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa Kesbangpol Depok secara konsisten memberikan Pendidikan Politik bagi masyarakat khususnya pemilih pemula dan dianggap berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula sebagai salah satu tugasnya. Persamaannya dengan skripsi penulis adalah

membahas tentang sosialisasi politik dan juga partisipasi politik, perbedaanya terletak dari skripsi penulis hanya berfokus membahas mengenai sosialisasi politik.

Penelitian lain juga pernah terdahulu dilakukan oleh Taufiq MS (2020) mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam skripsinya yang berjudul *“Sosialisasi Politik Virtual Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 Studi Sosialisasi Politik Pada Pemilih Millennial Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya”*. Penelitian ini menghadirkan Sosialisasi Politik yang lebih kekinian, dimana prosesnya dilakukan dengan virtual melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya, dengan fokus penelitiannya adalah kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018. Perbedaan dengan skripsi penulis adalah agen atau aktor dari sosialisasi politik. Pada penelitian ini menempatkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya sebagai agen ataupun aktor dari sosialisasi politiknya, berbeda dengan skripsi penulis dimana menempatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda sebagai agen ataupun aktor dari sosialisasi politik.

Referensi ketiga penulis pernah dilakukan penelitian terdahulu oleh Akbar Hidayatulloh (2019) mahasiswa jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul *“Peran Keluarga sebagai Agen Sosialisasi Politik dalam Pemilihan Peratin di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”*. Pada penelitian terdahulu ini lebih spesifik karena yang menjadi fokusnya adalah keluarga. Dalam sosialisasi politik keluarga dipandang sebagai *Primary Group* atau agen yang utama karena peranannya yang menjadi lembaga sosial terbesar. Orang

tua dan keluarga adalah agen sosialisasi politik utama seorang anak. Penelitian ini dilakukan di Desa Kenali, Kecamatan Balalau Kabupaten Lampung Barat. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas mengenai agen dari sosialisasi politik itu sendiri yaitu keluarga, tetapi perbedaannya terletak disini, skripsi penulis akan membahas mengenai sosialisasi politik yang dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dimana ini termasuk dengan kategori agen atau aktor sosialisasi politik *peers group*.

Penelitian terdahulu sebagai referensi keempat pernah dilakukan oleh Neko Harada mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dengan judul “Sosialisasi Politik di Lingkungan Keluarga (Studi Deskriptif pada Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang)”. Tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu yang ketiga, fokus penelitian ini juga adalah keluarga yang menjadi agen utama dalam sosialisasi politik. Dalam penelitian ini politik dipandang sebagai aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif. Politik juga melekat dalam lingkungan hidup manusia, baik sadar atau tidak politik hadir dimana-mana, politik mempengaruhi kehidupan individu maupun kelompok manusia. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tembung Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang dengan unit analisis adalah masyarakat yang tinggal di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Sedang yaitu keluarga yang terlibat di dalam partai dan pengurus partai dan mengerti tentang politik.

Penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya tetapi dengan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya

sebagai referensi tentunya, dimana penelitian ini lebih cenderung membahas tentang bagaimana peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, lebih jauhnya ingin menggali secara mendalam bagaimana pemikiran dan juga gerakan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat terkait dengan Sosialisasi Politik Pemilu 2024.

2.2 Konsep Peran

Peran (role) merupakan sebuah teori yang ramai diperbincangkan pada tahun 1930-an. Diskursus perihal peran tentu tidak lepas dari para pemikir ilmu-ilmu sosial seperti Max Webber (1864-1920), Talcott Parsons (1902-1979), Ralph Linton (1893-1953), Ralf Dahrendorf (1929-2009) yang meletakkan dasar teoritis untuk perihal peran tersebut. Diskursus ilmu sosial ini menjadi basis penting perkembangan pemikiran filosofis khususnya pada filsafat sosial dan politik sebagaimana dikembangkan oleh Jürgen Habermas (1929-) dan Hannah Arendt (1906-1975), Pierre Bourdieu (1930-2002).

Ada tiga hal yang senantiasa muncul dalam mendefinisikan teori peran yaitu, organisasi sosial, budaya dan performans yang muncul dalam interaksi manusia.¹ Dalam interaksi ini masing-masing individu tetap bertindak secara otonom. Jadi pada satu sisi manusia berada dalam sebuah struktur masyarakat dan budaya di sisi lain juga tampil dengan kekhasan individual. Sebenarnya di dalam teori peran ini juga bisa diamati secara empiris ruang hidup manusia, dimana di satu pihak ia adalah pribadi unik di sisi lainnya ia pun tumbuh dalam konteks masyarakat, ada struktur sosial budaya yang juga turut menentukan. Talcott Parsons mendefinisikan peran sebagai “*as the crucial social mechanism that positioned individuals in social*

¹ George Ritzer, *Encyclopedia of Social Theory* (California: Thomson Gale, 2005), hlm. 651.

structure but, more important, inculcated culture as individuals were socialized into them".² Dari definisi ini ada tiga hal yang bisa ditarik yaitu bahwa peran itu berkaitan dengan individu-individu dalam sebuah struktur dan menjadi budaya. Dalam tradisi ilmu psikologi sosial kontemporer teori peran ini dibagi dalam dua kategori yakni peran struktural dan interaksi simbolik.

Bila kita menelaah teori peran ini maka akan bersinggungan dengan pemikiran Pierre Bourdieu mengenai habitus. Bagi Bourdieu ada tiga aspek habitus. Pertama, habitus bukan sikap atau persepsi, tetapi serangkaian disposisi yang tertanam dalam diri individu (*embodied dispositions*), disebut juga oleh Bourdieu "*bodily hexis*" yang menjadi orientasi tindakan atau perilaku dalam masyarakat, yang diperoleh melalui proses sosialisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa habitus menjadi "kodrat kedua". Dalam pandangan Bourdieu, habitus "dibentuk" dan "membentuk", kondisi sosial dan budaya. Kedua, habitus tidak mendeterminasi, tetapi memberi orientasi. Maka mempunyai kemungkinan untuk tindakan lain, namun karena sifatnya historis maka kemungkinan itu dibatasi oleh kondisi obyektif. Ketiga, habitus merupakan produk sosialisasi, tetapi juga secara berkesinambungan dimodifikasi oleh pengalaman individu akan dunia luar, meskipun pada kenyataannya lebih banyak cenderung ke arah reproduksi daripada transformasi.

Pemahaman ini sebenarnya berdekatan dengan maksud penulis tentang peran. Peran itu merupakan tindakan keluar dan kedalam secara sinergis. Dalam peran ada dimensi "membentuk" tetapi sekaligus "dibentuk" dan sekaligus

² Ibid., hlm. 652.

menciptakan orientasi. Peran juga merupakan sebuah produk individu dan kelompok yang bercorak sosial struktural dan kultural sekaligus.

Dengan demikian konsep peran dalam penelitian ini juga ingin menampilkan dimensi individu yang berinteraksi dalam sebuah kelompok yang tumbuh berdasarkan sebuah cita-cita bersama (kolektifitas). Individu-individu itu kemudian secara nilai dipengaruhi oleh kondisi normatif dalam organisasi tersebut, tetapi sekaligus juga bisa mewarnai kelompok yang ada. Dalam interaksi ini muncul budaya bersama yang melekat pada individu dan sekaligus menjadi struktur normatif kelompok dan kerangka nilai (budaya kelompok).

Peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran dan kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.³ Peran berarti suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok, tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu muculah apa yang dinamakan peran. Pada pengertian lain, peran ialah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap

³ Wirutomo, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), h. 99-101.

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan situasi dan fungsi sosialnya.⁴ Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga dan yang menempati atau mengaku pada suatu posisi dalam sistem sosial.

2.3 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

2.3.1 Pengertian OKP

Organisasi merupakan sistem budaya yang telah ada sejak awal zaman manusia. Studi budaya awal menjelaskan bahwa aktivitas manusia purba misalnya berburu membutuhkan kerja organisasi. Sederhananya, organisasi adalah kegiatan yang didalamnya diatur hubungan antara sistem terbuka dan lingkungannya.⁵

Berangkat dari konteks diatas, organisasi manusia selalu memiliki aspek yang terbuka, karena organisasi sejatinya bukan sekedar bentuk, melainkan sistem. Dan berbicara tentang sistem berarti juga melihat fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem.

Suatu organisasi tentu mempunyai latar belakang dan orientasi ke masa depan. Motif dari terbentuknya sebuah organisasi bisa berasal dari cita-cita ataupun harapan sekelompok orang atau masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu diciptakanlah beberapa instrumen normatif, agar cita-cita yang telah digariskan tercapai dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan pengertian

⁴ Abdu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Koteks Struktur Sosial Masyarakat* (Jakarta: Bina Ilmu, 1982), h. 50.

⁵ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 137.

Organisasi Kerakyatan Pemuda atau disingkat OKP, dalam kajian ini lebih dilihat sebagai sistem yang hidup dan terbuka. Dan jika kita menilik sejarah Indonesia, sejalan dengan itu, organisasi kepemudaan dalam jaringan yang dinamis ini memiliki karakter yang terbuka.

Menurut Sentot Imam, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda merupakan lembaga yang didalamnya menghimpun potensi anak muda, baik pelajar atau yang sudah duduk dibangku kuliah, atau bahkan pemuda yang belum termasuk anak terdidik.⁶ Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ini berdiri karena visi-misi dan struktur kepemimpinan, budaya dan ide yang nantinya akan diimplementasikan. Bentuk organisasi itu lebih terkait dengan organisasi-organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Hima Persis, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lembaga organisasi daerah dan sejenisnya.

2.4 Teori Sosialisasi Politik

2.4.1 Definisi Sosialisasi Politik

Sosialisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu proses belajar individu di masyarakat untuk menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Singkatnya sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang didalamnya melibatkan proses penyampaian suatu nilai-nilai ataupun kultur kepada masyarakat.⁷

⁶ Arif Ridho. *Pengaruh Organisasi Kepemudaan HMI terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI di Bandar Lampung*. (Bandar Lampung, 2017). 7.

⁷ <https://kbbi.web.id/sosialisasi> (diakses pada 10 Januari 2023 pukul 08.65).

Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan dua orang yang memperkenalkan teori sosialisasi politik melalui bukunya. Dalam buku tersebut, Rush dan Althoff menerbitkan istilah baru dalam menganalisis perilaku politik tingkat individu, yaitu sosialisasi politik.⁸

Sosialisasi politik sebagai proses yang dapat mengarahkan individu untuk lebih memahami sistem politik yang ada, untuk kemudian menentukan persepsi dan tanggapan mereka mengenai fenomena politik, dapat berupa masukan, kritik ke orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan dan lain sebagainya. Fungsi sosialisasi politik menurut Rush dan Althoff adalah membentuk individu dan memelihara sistem politik.

Dengan sosialisasi, seseorang dilatih untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai politik yang sesuai dengan sistem politik. Indonesia menganut ideologi Pancasila. Karena itulah, dimulai dari dini sampai perkuliahan sekalipun kita akan menemukan pelajaran yang berkenaan dengan Pancasila dan juga Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu merupakan usaha dari pemerintah untuk warga negaranya. Dengan hal itu diharapkan untuk individu dapat menerima atau menolak atau menentang tindakan pemerintah apabila menyeleweng, mematuhi hukum, dan menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, serta berpartisipasi dalam politik atau berpartisipasi dalam pemilihan dan lain sebagainya.

Ramlan Surbakti menuturkan sosialisasi politik sebagai satu kesatuan cara untuk bagaimana penyampaian pesan politik, yang kemudian menjadi dua

⁸ Muslim Mufti. *Teori-Teori Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 83.

yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik.⁹ Sosialisasi politik masih menjadi bagian dari proses pendidikan politik, dimana didalamnya terdapat tujuan untuk membangun bagaimana sikap masyarakat berpartisipasi melalui aktivitas politik dan sistem politik yang seharusnya ada.¹⁰

Di Indonesia, masyarakatnya mengenal konsep kebhinekaan dan ditanamkan nilai-nilai dari Pancasila sedari dini melalui proses sosialisasi politik yang tumbuh dengan masyarakat. Proses itu menunjukkan bagaimana identifikasi dan pendalaman nilai-nilai politik yang menjadi orientasi politik untuk memahami peran masyarakat dalam sistem politik yang stabil dan berkelanjutan.

Pendapat lain, Dennish Kanavagh mengatakan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara ataupun mengubah budaya politik di masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman yang diberikan berdasarkan budaya politik yang dilanjutkan dari satu generasi ke generasi lainnya seperti pemahaman mengenai nilai, keyakinan, sikap dan khususnya perilaku politik. Disana terjadi proses pembentukan pengetahuan dan juga pemahaman budaya yang ingin dijaga ataupun yang ingin diubah.¹¹

Menurut Syarbaini dkk sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

⁹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 117.

¹⁰ Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 154.

¹¹ Zulfikri Sulaeman. *Demokrasi untuk Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2010). Hlm. 20.

Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal atau tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Artinya sosialisasi politik merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, di mana sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa juga berperan sebagai agen atau pelaku sosialisasi politik.¹²

2.4.2 Metode Sosialisasi Politik

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Rush dan Althoff menyuratkan terdapat tiga acara¹³, yaitu:

1. Imitasi

Imitasi merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu lain, dan merupakan hal yang sangat penting dalam sosialisasi pada masa anak-anak. Sederhananya imitasi adalah ketika seseorang atau individu meniru tingkah laku individu lain. Secara praktis ini adalah proses penyerapan atau mendapatkan orientasi politik dengan cara meniru orang lain.

¹² Basrowi, Sukidin, Sisiola. *Sosiologi Politik*. (Bogor: Ghalia Indonesia). Hlm. 55.

¹³ *Loc. Cit.* Hlm. 84.

2. Intruksi

Intruksi atau perintah merupakan cara penyampaian sosialisasi politik yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Instruksi memungkinkan orang lain memberi pemahaman kepada individu mengenai posisi mereka, hal apa yang harus dilaksanakan, dan lain sebagainya.

3. Motivasi

Metode ini adalah mekanisme politik dalam membentuk sikap politik, perilaku seseorang, atau sebuah kelompok. Dengan cara ini individu langsung belajar dari hal yang dialaminya sendiri, ataupun dengan mengikuti seseorang ataupun tokoh yang diidealkannya.

2.4.3 Agen-agen Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik tidak terjadi di ruangan hampa, semua masyarakat mempunyai agen-agen atau aktor yang berfungsi mengembangkan dan mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik. Kendati banyaknya agen atau aktor yang melaksanakan fungsi sosialisasi politik, dalam realitasnya dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Sosialisasi politik membutuhkan agen ataupun aktor dalam penyampaiannya. Agen dan aktor ini memegang peranan penting, karena merekalah yang memberikan pengetahuan mengenai segala aspek politik yang nantinya

menjadi doktrin mengenai nilai dan norma yang disampaikan.¹⁴ Dikenal sebagai agen dalam kegiatan sosialisasi politik yang memiliki tugas untuk mempengaruhi individu.¹⁵ Rush dan Althoff menguraikan lima agen sosialisasi politik yang terkenal, yaitu sebagai berikut.

1. Keluarga

Kehidupan keluarga merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga adalah kelompok utama dan faktor sosial terpenting yang mempengaruhi pandangan politik individu, sikap-sikap politik masa depan dan lain-lain.

2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat bagi seorang anak membangun kesadarannya tentang dunia politik dan perannya di masyarakat. Sekolah bisa membuka pemikiran seorang anak tentang politik.

3. *Peer Group*

Peer group atau agen sosialisasi yang berisikan kumpulan individu dari lingkungan terdekat ini dapat memengaruhi tindakan hingga kebiasaan seseorang dalam menjalankan kegiatan politik.

4. Media Massa

Media massa atau pers merupakan sarana penyampaian sosialisasi politik yang memiliki pengaruh cukup besar. Akan tetapi, informasi terkait

¹⁴ M Teguh Wibowo dan Effendi Hasan. *Sosialisasi Politik bagi Politik Pemula di Lingkungan Keluarga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah. Vol.2 No.2, hlm. 538-539.

¹⁵ *Loc. Cit.* Hlm. 85.

politik terkadang disampaikan dengan secara berlebihan karena media massa biasanya membingkai suatu isu dalam perspektif tertentu.

5. Pemerintah

Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah merupakan agen sekaligus menjalankan peran politiknya, pemerintah membentuk sistem pendidikan dan bahkan kurikulum tertentu.

2.4.4 Tujuan Sosialisasi Politik

Tujuan dari sosialisasi politik adalah untuk membentuk dan menanamkan kepribadian serta kesadaran dalam berpolitik. Selain itu, untuk membangun kemampuan dan membentuk pola partisipasi masyarakat yang efektif dalam aktivitas politik, sehingga nantinya dapat diterima dan diimplementasikan dalam sistem politik. Itulah yang menjadi tujuan sosialisasi politik yang mengandung pendidikan politik.¹⁶ Berikut ini secara spesifik tujuan dari sosialisasi politik¹⁷:

1. Membangun Kepribadian Politik

Bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berisikan nilai yang dipegang oleh negara serta memberikan interpretasi tentang keharusan yang menjadi dasar untuk membina dan mengembangkan diri di bidang politik. Diharapkan manusia menjadi warga negara yang memiliki

¹⁶ Damsar. *Sosiologi Politik* (Jakarta: Prenadamedia, 2019). Hlm. 154-155.

¹⁷ Ahmad Dzakarín. *Tarbiyah Siyasah*. (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 25.

kemampuan dan bertanggung jawab kepada bangsa dan negaranya yang berlandaskan nilai dan norma yang berlaku.

2. Kesadaran Politik

Seseorang atau individu dapat merangsang kesadaran suatu masyarakat. Karena kesadaran adalah kondisi psikologis yang mana individu akan peka pada suatu hal. Hal itu dilakukan untuk nantinya mampu melihat permasalahan politik secara mendalam dan masuk akal mencakup kondisi politik atau iklim politik suatu bangsa.¹⁸

3. Partisipasi Aktif

Menyadarkan fungsi politik yang dimiliki oleh tiap-tiap individu merupakan tujuan dari sosialisasi politik. Sehingga dapat mengarahkan sikap seseorang untuk mempunyai niat yang kuat dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab.¹⁹

2.5 Pemilihan Umum

2.5.1 Definisi Pemilu

Pemilihan umum adalah pasar politik dimana individu atau masyarakat berinteraksi untuk membuat kontrak sosial, antara peserta pemilihan umum (partai) dan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah menyelesaikan beberapa kegiatan politik seperti kampanye, iklan, propaganda dan lainnya. Umumnya pemilu dilakukan secara langsung, rahasia dan bebas, dan itu juga

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

syarat mutlak sebuah pemilu dan lazimnya ada kepanitian yang mengatur dan mengawal jalannya pemilu.²⁰

Dalam studi politik, dikatakan bahwa pemilihan umum sebagai aktivitas politik. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Oleh karena itu, pemilihan umum sangat vital bagi sebuah negara demokrasi. Karena salah satu indikator demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.²¹

Penyelenggaraan pemilu di beberapa negara umumnya dilaksanakan empat sampai lima tahun sekali. Di Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum dilakukan sekali dalam lima tahun. Di negara lain misalkan Amerika Serikat, menyelenggarakan pemilu sekali dalam empat tahun. Untuk sebuah negara demokrasi, pemilu bagian dari salah satu hak asasi manusia yang sangat prinsipil. Peran serta masyarakat dalam sebuah pengambilan keputusan dijamin pada prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, memungkinkan dan juga sebagai sebuah keharusan peraturan yang diatur dalam perundangan-undangan yang hendak dibuat dan diterapkan bisa menghadirkan perasaan keadilan bagi seluruh masyarakat.²²

²⁰ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang* (Jakarta: Pradyana Paramita, 1981), hlm. 5-14.

²¹ Kansil, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986), hlm. 47.

²² Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1 (April 2014), hlm. 6.

Pemilu sangat penting untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Adanya demokrasi tidak akan diakui selama tidak dilaksanakan lewat pemilu untuk menentukan orang yang berhak duduk di kursi pemerintahan ataupun wakil-wakil rakyat. Tujuan untuk mewujudkan dan menjaga nilai-nilai demokrasi, pelaksanaan pemilu yang secara langsung adalah pilihan yang tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.²³

2.5.2 Sistem Pemilu

Secara konseptual, perlu digaris bawahi bahwa pemilu bertujuan memilih wakil rakyat (bukan wakil partai) untuk duduk di parlemen, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dan senantiasa tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak serta merta dan tidak dibenarkan jika sebuah pemilu dapat menyebabkan rusaknya sendi-sendi dan juga tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan sebuah pemilu menjadi sebuah keharusan untuk sungguh-sungguh dan memperhatikan dalam pelaksanaannya memegang prinsip-prinsip dasar dari pemilu itu sendiri yaitu penentuan calon harus secara terbuka, melibatkan partisipasi publik seluas-luasnya, legitimasi calon ditetapkan harus cukup tinggi terhadap konstituen (para pemilih), ada pertanggung jawaban antara wakil dan konstituen, kemudahan dalam proses perhitungan suara dan penentuan terpilih, penegakan perundang-undangan, keadilan dalam kepastian hukum.

²³ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD.Sabar, 2011), hlm. 140.

Literatur studi Ilmu Politik berkaitan dengan pemilu sebagai syarat negara demokrasi, setidaknya terdapat lima fungsi pemilu sebagai sebuah upaya mencapai tujuan pemilu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, yang juga berhubungan dengan tujuan pemilu itu sendiri. Pertama, fungsi untuk mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Kedua, pemilu sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan pemilu dengan elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

Ketiga, fungsi perwakilan politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Keempat, sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu, keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program-program kebijakan yang dihasilkannya.²⁴

Dalam upaya mengembangkan sistem dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan senantiasa menghormati keberagaman aspirasi politik serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, ketentuan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GHBN tahun 1999-2004 dan ketentuan pasal 22E UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu

²⁴ Gantara, Sahid. *Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008). Hlm. 208.

dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri serta independen dan nonpartisan. Asas pemilu yang digunakan dalam pemilu 2024 adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan praktis.²⁵

2.5.3 Pemilu di Indonesia

Salah satu ciri utama dari negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara periodik. Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar dalam negara demokrasi adalah rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Demokrasi menempatkan manusia dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.²⁶

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu Presidensial dimana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negaranya yang dipilih oleh rakyatnya.²⁷

²⁵ Basrowi, Sukidin, Susilo. *Sosiologi Politik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012). Hlm. 55.

²⁶ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 3 No. 1, hlm. 6.

²⁷ Ines Wulandari, "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)". (Skripsi Program Studi Siyasah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), hlm. 3.

Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara maupun masalah yang datang dari luar. Mengangkat seorang kepala negara yang akan mengelola negara, memimpinya, dan mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri.²⁸

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.²⁹

Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada suatu negara pada umumnya berpedoman pada peraturan, baik peraturan tertulis maupun peraturan tidak tertulis. Di Indonesia penyelenggaraan Pemilu sebagian besar beracuan pada peraturan perundang-undangan, yaitu berbagai bentuk peraturan yang memiliki kekuatan mengikat yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Tata urutan peraturan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia harus berpijak dan

²⁸ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 32.

²⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 461.

berpedoman pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, Pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum, karena melalui Pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya Pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.³⁰

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 221- 222.

“Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.

Pemilihan Umum di Indonesia sampai dengan tahun 2019 telah dilaksanakan sebanyak sebelas kali. Pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Dan pada tanggal 17 April 2019 menjadi Pemilu yang ke dua belas.

Meskipun undang-undang politik tentang pemilihan umum (UU Pemilu) dari pemilu ke pemilu beberapa kali mengalami perubahan, perubahan itu ternyata tidak bersifat mendasar, kecuali pemilu 2004, khususnya masalah asas-asas pemilihan umum. Secara umum, asas-asas dari pemilu ke pemilu di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung, sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara.
2. Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak

siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nuraninya dan kepentingannya.

4. Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur, yaitu setiap penyelenggaraan pemilu aparat, pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, yaitu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian skripsi dapat mencakup baik masalah yang sudah terjadi (retrospektif) maupun masalah yang akan datang (prospektif). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan prospektif. Pendekatan prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan, tetapi dengan berdasarkan situasi saat ini. Hal ini relevan dengan maksud dan tujuan penulis untuk menganalisis dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan dan potensi tantangan serta untuk memahami Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang menjadi fokusnya adalah Sosialisasi Politik yang dilakukan dengan dihadapkan pada Pemilu 2024 yang akan datang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain menggunakan pendekatan prospektif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan induktif, metode induktif adalah sebuah penarikan kesimpulan berdasarkan hal-hal yang khusus kemudian diambil generalisasinya dengan berfokus pada sebuah kelompok yang meliputi keadaan dari yang sudah lalu, yang sedang terjadi, dan bahkan masa yang akan datang. Dengan mengacu atau berkonsentrasi pada masalah tertentu, tujuannya adalah individu atau kelompok sosial tertentu.³¹

Metode ini cocok dengan masalah penelitian yang hendak penulis deskripsikan dan peneliti tertarik membahasnya mengenai bagaimana Peran

³¹ Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm. 31.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024, yang menjadi objeknya merupakan salah satu OKP dan juga Ormawa di Indonesia yaitu Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dengan fokus pemikiran dan gerakannya terkait dengan Sosialisasi Politik yang dihadapkan pada momentum Pemilu 2024 yang akan datang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber secara verbal melalui metode wawancara atau bentuk dokumentasi tertulis lainnya.³²

Sumber data utama data penelitian ini adalah berupa perkataan serta tindakan, yang lainnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.³³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁴

1. Sumber Data Primer

Sumber yang didapatkan secara langsung dari narasumber aslinya tanpa perantara dengan metode seperti wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Data primer dapat berbentuk pendapat objektif secara individual ataupun kelompok.

³² Yusuf M.A. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017).

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

2. Sumber Data Sekunder

Sumber yang didapatkan dari berbagai Pustaka seperti buku, jurnal, artikel, web, blog, serta penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan data-data untuk menganalisis gejala yang sedang diteliti. Data dikumpulkan dari hasil beberapa metode. Penulis diantaranya menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data.³⁵

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dari pengumpulan data dengan cara menanyakan secara sistematis dan terstruktur kepada narasumber ataupun responden demi mengetahui data yang lebih akurat dari narasumber. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.

Pada prosesnya peneliti melakukan proses interaksi tanya jawab atau berdiskusi serta menyiapkan beberapa aspek pertanyaan yang dibutuhkan dan ditanyakan kepada informan mengenai kebutuhan peneliti dalam mengetahui masalah yang hendak dikaji sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam hal ini peneliti menetapkan 6 informan yang terdiri dari 2 informan utama yaitu Ketua Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat dan Bidang Politik dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat, 1 informan kunci yaitu Ketua Umum Pimpinan Pusat Hima Persis, dan

³⁵ Adon Nasrullah. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Refka Adtama, 2018).

3 informan tambahan yaitu KPU Jawa Barat, Tokoh Masyarakat atau Aktivistis, dan juga Anggota atau Kader Hima Persis yang Aktif.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap objek atau fenomena dengan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Proses ini sangat membutuhkan kecakapan analisis dan kemampuan observasi yang cukup untuk mendapatkan hasil data yang maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap bagaimana pemikiran dan juga gerakan Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat seperti melihat agenda acara, program kerja, rencana organisasi, dan lain sebagainya.

Observasi ini sangat bermanfaat untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti secara objektif dan faktual tentunya. Dengan observasi diharapkan peneliti memperoleh data tambahan yang lebih jelas serta menemukan informasi yang belum lengkap ataupun belum terungkap dalam proses wawancara sebelumnya.

3. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan perlu dilakukan sebagai tambahan informasi. Dalam hal ini, peneliti mencari dan membaca dari sumber-sumber seperti internet, buku, makalah, jurnal, naskah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini tentunya.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data yang sudah diperoleh dalam proses penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan angka, tetapi dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif secara spesifik, luas, dan mendalam. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sistematis berdasarkan fakta dan komprehensif.

Dalam bukunya *Metode Penelitian Sosial* Sukmadinata mengemukakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau peristiwa yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif berfokus pada isu-isu aktual seperti yang ada pada saat penelitian. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif untuk mencoba mendeskripsikan bagaimana peristiwa yang menjadi fokus perhatian dideskripsikan tanpa memberikan perlakuan khusus.³⁶

Disamping menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik reduksi data digunakan juga dalam penelitian ini. Reduksi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik data seperti yang dilakukan pada pengumpulan data skripsi ini seperti wawancara, observasi, dokumentasi seperti foto dan video/audio, dan penulisan kepustakaan.

Langkah selanjutnya akan dilakukan pengorganisasian atau memilah dan memilih data ataupun penyederhanaan, penggolongan, dan memisahkan yang tidak perlu sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermakna, memudahkan dalam

³⁶ Adon Nasrullah. *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: PT Refka Adtama, 2018).

menarik kesimpulan, sehingga akan mudah dipahami oleh penulis dan juga para pembaca.

Analisis data yang dilakukan adalah dengan memeriksa segala bentuk data dari komponen penelitian seperti catatan, dokumen, rekaman, naskah, hasil wawancara dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga dilakukan teknik analisis data sebelum di lapangan dan selama di lapangan.

Teknik analisis data sebelum di lapangan dilakukan terhadap data yang diperoleh dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti seperti dari buku, jurnal, artikel serta hasil penelitian yang bersangkutan dengan sosialisasi politik dikembangkan selanjutnya dalam analisis data selama berada di lapangan.³⁷

3.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan ke salah satu Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ataupun OKP sekaligus Organisasi Kemahasiswaan di Indonesia yaitu Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dari mulai bulan Desember 2022 mengajukan judul sampai dengan bulan Februari 2023 dilakukan sidang proposal penelitian dan kemudian bulan-bulan berikutnya penulis melakukan penelitian tentunya seperti mencari data, mengolah data, dan juga mengumpulkan data untuk nantinya disajikan di bab selanjutnya.

³⁷ *Ibid*

Jadwal Penelitian

Susunan Penelitian	Bulan Desember 2022	Bulan Januari 2023	Bulan Februari 2023	Bulan Maret 2023	Bulan April 2023	Bulan Mei 2023	Bulan Juni 2023	Bulan Juli 2023	Bulan Agustus 2023
Diajukan Judul									
Proses Dibuat Proposal Penelitian									
Bimbingan Proposal Penelitian									
Seminar Proposal Penelitian									
Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data									
Penetapan SK									
Penyusunan Skripsi									
Bimbingan Skripsi									
Sidang Skripsi									

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Objektif Penelitian

4.1.1 Sejarah Hima Persis

Tahun 1990 dikenal dengan era kebangkitan gerakan mahasiswa setelah lahirnya Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Dimana pada saat itu, gerakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan kebebasan berpendapat mulai muncul kembali. Tanda-tanda partisipasi publik yang terbuka, demokratisasi, kebebasan berpendapat, dan pemetaan “musuh bersama” saat itu diproduksi oleh idealisme mahasiswa yang sempat menggurita. Keadaan demikian memberikan kesadaran-kesadaran batin kepada mahasiswa untuk terus melakukan perubahan dalam segala aspek. Hima Persis secara tidak langsung lahir di tengah kesadaran tersebut.³⁸

Embrio Hima Persis muncul jauh sebelum kelahirannya. Terbentuknya kelompok dan komunitas mahasiswa alumni Pesantren Persatuan Islam ataupun keluarga Persis menimbulkan “*sense of belonging*” yang sama. Masyarakat *geimenschaft* atau dalam istilah kita paguyuban, belum menjadi organisasi yang terstruktur dan memiliki visi-misi yang jelas. Menurut Ariful Mursyidi geliat kebangkitan kelompok mahasiswa di lingkungan Persis sesungguhnya sudah mulai nampak sejak masa sebelum 1995, terutama dimotori oleh para mahasiswa alumni

³⁸ PP Hima Persis. *Merefleksikan Kiprah Hima Persis dalam Mengelola Sumber Daya Kader sebagai Khadimu Ummah Yang Negarawan Yang Ulama*. (Bandung: PP Hima Persis, 2018-2020), hlm. 13.

Pesantren Persis yang kuliah di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Mereka berinisiatif membentuk kelompok silaturahmi intelektual mahasiswa Persis di Bandung dengan dibentuk Himatul ‘Alimin, di Jakarta HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam), dan di Yogyakarta LKMPI (Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam). Pada perkembangan selanjutnya di Jakarta berubah nama menjadi Studi Holistika Jakarta dan di Garut muncul JMPI (Jaringan Mahasiswa Persatuan Islam).³⁹

1. Fase Kelahiran

Hima Persis sebagai otonom dari Persis berdiri pada saat Ustadz Latif Mukhtar, M.A menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam. Pada awalnya, Hima Persis ini diharapkan dapat menjadi media transformatif gagasan Persis itu sendiri di kampus-kampus serta dapat mengembangkan produk-produk intelektual kampus dalam upaya mendukung perjuangan Persis di masa depan sesuai dengan tantangan pemikiran yang lebih ke arah “ilmiah” dan “intelektualis”.

Kesadaran untuk membentuk organisasi yang menyatukan kader-kader mahasiswa Persis sudah menjadi opini sejak lama, sekitar tahun 90-an lebih tepatnya. Meski saat itu masih bersifat sektoral, karena pembagian awal didominasi di Bandung, wacana ke arah itu bermula dengan inisiasi pembentukan Himmatul ‘Alimin yang berarti “semangat/girah kaum pendidik” dan juga merupakan akronim dari Himpunan Mahasiswa dan

³⁹ PP Hima Persis. *Merefleksikan Kiprah Hima Persis dalam Mengelola Sumber Daya Kader sebagai Khadimu Ummah Yang Negarawan Yang Ulama*. (Bandung: PP Hima Persis, 2018-2020), hlm. 14.

Alumni Mu'allimin' yang berada di IAIN (sekarang UIN) SGD Bandung. Selanjutnya, mahasiswa Persis yang sedang studi di Jakarta membentuk Hima Persis (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam) yang berada di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Sementara itu di Jogja membentuk pula HIMAPI (Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada 24 Maret tahun 1996 di Kongres Cianjur, Hima Persis Jakarta, Himatul'alimin Bandung dan HIMAPI Jogja dan mahasiswa muslim (termasuk mahasiswi) dimana sejarah dan emosionalnya memiliki ikatan dengan Persis itu berkumpul dan berpartisipasi dalam diskusi tentang identitas dan masa depan mahasiswa Persatuan Islam. Setelah melalui diskusi dan dialog alot, nama Hima Persis mengkristal. Sejak saat itu, pada tanggal 24 Maret 1996, diputuskan melalui keputusan bersama bahwa nama Hima Persis akan menjadi identitas resmi Himpunan Mahasiswa Persis. Dengan demikian, baik Himmatul 'alim maupun HIMAPI otomatis menyatu dan disintesa dalam nama Hima Persis. Hima Persis adalah nama yang lahir dari komitmen bersama, semangat dialog dan aspirasi kolektif yang pada akhirnya terintegrasi.⁴⁰

2. Fase Perkembangan

Dalam perjalanan awalnya, Ihsan Setiadi Latief terpilih sebagai ketua umum pertama. Pada masa kepemimpinannya ini penuh diisi dengan internalisasi. Sampai tahun 2000, terdaftar telah memiliki kurang lebih 8

⁴⁰ Ariful Mursyidi. 2009. *Memperkuat Hima Persis sebagai Kelompok Progresif*. Hlm. 1.

komisariat yang berada di berbeda-beda wilayah, dan juga 2 komisariat rintisan.

Meski distribusinya masih terlihat kurang, setidaknya ini menjadi kontribusi dan titik tolak bagi Hima Persis ke depan, baik secara konseptual dan praktiknya. Wacana “Ulul Albab” pada periode ini dijadikan falsafah gerakan Hima Persis, yang diwujudkan dalam tema “*theorist*” intelektual dan “*moralis*”. Kedaulatan dan kepemimpinan dipandang sangat efektif selama periode ini. Pada titik inilah internalisasi prakader dengan diklat kepemimpinan santri dimulai.

Angkatan kedua, era Khaerudin Amin (2000-2002), lebih digencarkan publikasi dan perkembangan jaringan ke organisasi lain seperti Ormawa, OKP, ormas, dan lain-lain pada periode ini. Hal itu dibuktikan dengan semangat Hima Persis dalam menanggapi isu sosial dan politik. Tetapi dimulai dari tingkat komisariat, daerah dan wilayah belum terkondisikan dengan baik. Namun perlu diingat bahwa selama ini Pimpinan Pusat Hima Persis merumuskan Doktrin Ulul Albab yang dirumuskan dalam Falsafah Perjuangan Hima Persis yaitu perjuangan ilmiah, progresif dan revolusioner, yang merupakan rumusan doktrin ayat Al-Qur'an tentang konsep Ulul Albab. Saat itu pula ia mampu mensosialisasikan deklarasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPNI) di Jawa Barat dan membantu menentukan arah.⁴¹

⁴¹ Khaerudin Amin. 2002. *Pengantar Ketua Umum Hima Persis, Jurnal Ulul Albab*. Hlm. 1.

Kemudian Latief Awaludin terpilih menjadi ketua PP Hima Persis (2002-2005), yang terpilih menggantikan Khaerudin Amin. Berbeda dengan ketua sebelumnya, di era ini lebih persuasif, fleksibel, dan juga adaptif. Era ini gencar melakukan internalisasi, membuka jalur komunikasi untuk mempublikasikan dan menjawab permasalahan sosial politik massa, membuka jaringan eksternal untuk menonjolkan keberadaan Hima Persis, dan menjaga hubungan baik dengan PWK Persis Singapura dengan tujuan untuk memajukan adanya Hima Persis lebih diakui.⁴²

Berikutnya adalah Angkatan Lamlam Pahala (2005-2008, 2008-2010) yang lebih fokus mengoptimalkan dimensi internal-eksternal pada fase 2005-2008. Internal meliputi perbaikan tata kelola dan pembentukan pola organisasi, peningkatan pembinaan kader dan pra kader, ekspansi, mengikuti perkembangan zaman, dan pemeliharaan hubungan dengan otonom lain dan yang lebih tua. Di eksternal, dipupuk isu sosial-politik, dijalin hubungan baik dengan organisasi lain dan dengan partai dan tokoh nasional guna melanjutkan eksistensi organisasi.⁴³ Komunikasi dan kerjasama dengan organisasi pemuda muslim yang ada di Malaysia. Pada tahun 2008 Hima Persis memprakarsai pembentukan Pembentukan Ikatan Mahasiswa (IPP) Persis dan pada tahun 2010 IPP resmi berdiri dan dideklarasikan di Garut, tetapi saat itu masih menjadi lembaga bukan menjadi otonom yang berada dibawah naungan Persis.

⁴² QA-QD Hima Persis 2016-2018

⁴³ Lamlam Pahala. 2007. *Hima Persis dan Gerakan Intelektual*. Hlm. 5.

3. Fase Peneguhan

Kemudian pada mukhtamar VI Hima Persis tanggal 25-27 September 2010 di Tasikmalaya, terpilih Reza Anshori menjadi ketua umum PP Hima Persis periode 2010-2013, dimana pada periode ini Reza Anshori memperkuat fokus gerakan ditataran internal dan eksternal. Di internal, gerakan penguatan intelektualitas kader diwujudkan dengan dibuatnya modul kajian sesuai dengan tingkatan level pimpinan, baik kajian yang bersifat turats/klasik maupun kajian yang bersifat kontemporer.

Sedangkan ditataran eksternal, pada masa ini akan terus memperkuat sayap-sayap organisasi dengan terus membentuk pimpinan-pimpinan wilayah Hima Persis di provinsi yang belum terbentuk Pimpinan wilayah. Membangun komunikasi organisasi dengan ormawa, OKP, ormas, orpol dan para tokoh nasional guna lebih mengeksiskan Hima Persis di kancah nasional. Lebih meluaskan jaringan Hima Persis internasional dimana jika pada kepemimpinan sebelumnya telah terjalin dengan akademisi di Malaysia, maka pada kepemimpinan ini akan menjalin komunikasi organisasi dengan mahasiswa Al-Azhar Mesir.

Pada muktamar VII yang berlangsung 6-9 Juni 2015 di Depok, terpilih Nizar Ahmad Saputra 2013-2016. Pada era ini Hima Persis tampil lebih percaya diri dengan melakukan penguatan jaringan nasional. Membangun basis kader di berbagai daerah dengan masif, tercatat berdiri Pimpinan Wilayah Banten dan beberapa Pimpinan Daerah serta Pimpinan Komisariat strategis. Membuka wacana politik dan ekonomi

nasional, juga wacana Kepersisan, Keislaman, dan Kebangsaan serta menguatkan intelektualitas kader dan membekali dengan pendidikan politik lewat Madrasah Politik. Selanjutnya, menerbitkan buku-buku karya intelektual kader. Terhitung empat buku yang dihasilkan melalui lembaga penerbitan Hima Persis Press.

Pada Mukhtamar ke-VIII Hima Persis 24-25 September 2016 di Bandung, terpilih kembali Nizar Ahmad Saputra untuk periode 2016-2018. Hima Persis berkantor di Jakarta sebagai amanah Mukhtamar, juga usaha untuk menyejajarkan diri dengan ormawa dan OKP nasional, membuka lebih lebar jaringan nasional dan memperkenalkan gerakan Hima Persis kepada semua elemen bangsa, dengan membawa *grand issue* kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.

Pada periode ini Hima Persis mencanangkan tiga tahap pengembangan Hima Persis selama dua tahun periode 2016-2018. Pertama internalisasi, kedua eksternalisasi dan ketiga distribusi dan aktualisasi kader. Internalisasi melalui konsolidasi nasional organisasi dan perluasan wilayah garapan dengan menambah Pimpinan Wilayah baru, dan memperkuat wilayah yang sudah eksis. Memperkuat kaderisasi struktural (KABAH, MAKKAH dan MADINAH) dan kultural (intelektual). Eksternalisasi dengan banyak melakukan kunjungan dan silaturahmi organisasi, bertukar pikiran dan gagasan, serta mempublikasikan karya

intelektual yang merupakan bagian dari identitas Hima Persis sebagai organisasi kader.⁴⁴

Di awal periode ini Hima Persis bergabung bersama Umat Islam Indonesia dalam aksi Bela Islam I-IV, yang pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Ahok melakukan penistaan terhadap agama Islam, ikut serta dalam advokasi Muslim Rohingya yang ditindas di Myanmar. Di periode ini pula, kesadaran untuk membenahi Hima Persis menuju organisasi dengan pengelolaan yang profesional, tertib dan rapi. Digitalisasi dalam pengelolaan administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga tercipta organisasi modern yang efektif dan efisien.

Pada periode ini, Hima Persis melakukan ekspansi sampai ke 12 Pimpinan Wilayah se-Indonesia, memperkuat jaringan eksternal dengan tergabung di Forum Cipayung Plus bersama 11 ormawa besar nasional. Membuat draft pedoman tiap bidang, dan melakukan restrukturalisasi dan inovasi di setiap level pimpinan yang mengacu pada grand desain Hima Persis yaitu Insan Ulul Albab dan Negarawan Reformis.⁴⁵

Kemudian muktamar XII di Jakarta 25 September 2018 terpilih saudara Iqbal M Dzilal. Pada masa kepemimpinan Iqbal M Dzilal, terjadi perubahan besar-besaran pada komposisi kepengurusan. Dimana di umur Hima Persis di tahun ke 20, delegasi dari setiap pimpinan wilayah menjadi representasi pengurus di Pimpinan Pusat. Terpilihnya Iqbal M Dzilal di

⁴⁴ *Loc. Cit.* Hlm. 27.

⁴⁵ (QA-QD Hima Persis 2016-2018)

Muktamar XII Jakarta 25 September 2018, tentu merupakan tantangan yang sangat berat. Selain terpilih dari hasil aklamasi (setelah Tuan Ihsan Setiadi), Iqbal Dzilal di dapuk untuk memimpin organisasi Hima Persis yang (dirasa) kental dengan nuansa politis lalu dibawakan dengan format pengurus yang akomodatif. Namun, dengan berbagai keterbatasan dan upaya untuk meneruskan perjuangan di Pimpinan Pusat Hima Persis kemudian berbagai aktivitas dan konsentrasi organisasi di ciptakan.⁴⁶

Pada agenda awal kepemimpinan, melakukan berbagai konsolidasi dengan berbagai elit baik dari tataran jamiyyah, birokrat, akademisi ataupun para ahli. Maka rutinitas di awal agenda kepemimpinan adalah menguatkan ekspansi eksternal terutama dalam basis jaringan. Tepat di awal tahun 2019, agenda Hima Persis dan pusat dari perbincangan banyak orang adalah momen politik Pemilu 2019, dimana komponen Hima Persis baik di pusat, sampai ke tingkat daerah melakukan proteksi dan menarik diri dari keberpihakan terhadap paslon. Karena independensi menjadi merupakan wujud nyata dimana Hima Persis tetap berupaya ada di tengah-tengah sebagai katalisator antara birokrat dengan rakyat.

Fokus pengembangan di kuartal pertama 2018-2020 ialah memperkuat basis suprastruktur organisasi, merawat dan membina Pimpinan Wilayah terluar dan kurang perhatian. Semua itu tentu bermuara pada pendidikan basis nilai kader Hima Persis. Tentu, usaha pendidikan, pembinaan, dan *sharing* keilmuan adalah misi utama sekaligus untuk

⁴⁶ *Loc. Cit.* Hlm. 28.

mereduksi fanatisme daerah, meredam program-program seremonial non substantif.⁴⁷

4.1.2 Peran Hima Persis

Hima Persis adalah organisasi otonom yang berada dibawah naungan ormas Persatuan Islam. Secara garis besar Hima Persis memiliki dua peran kunci, peran internal dan eksternal.⁴⁸

1. Peran Internal

Persis memiliki kurang lebih 5 juta anggota di Jawa Barat dan ratusan cabang di Indonesia. Meski tergabung dalam berada dibawah naungan Persis, Hima Persis memiliki kemandirian dan karakter yang tidak sama. Hima Persis akan membuka ruang baru dalam pemikiran dan gerak Persis. Kedepannya kader Hima Persis akan mengambil langkah menghadirkan Persis yang lebih modern yang diharapkan akan memajukan Indonesia di berbagai bidang dengan karakter yang terus mengikuti prinsip-prinsip Islam.

Agar semua itu terwujud, Hima Persis membuka pintu selebar-lebarnya bagi para mahasiswa baik anggota jamiyyah Persis atau yang bukan sekalipun untuk ikut serta dalam membangun kembali Persis menjadi lebih baik, dan meneruskan ulama-ulama Persis seperti Ahmad Hassan, Muhammad Natsir, Isa Anshari, Latief Muchtar dan Shiddiq

⁴⁷ *Loc. Cit.* Hlm. 31.

⁴⁸ Dilan Imam Adilan. *Hima Persis Kenapa Ada?*. 2020 (<https://www.kompasiana.com/satriaqaqshat3246/5e8600b4d541df4c5f566522/himpunan-mahasiswa-persatuan-islam-hima-persis-kenapa-ada>, diakses pada 12 Januari 2023 pukul 01.41)

Amien, dan juga perjuangan dakwah dan pengembangan organisasi di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya dan politik.

2. Peran Eksternal

Hima Persis sebagai OKP memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga Indonesia dan memajukan bangsa ini sebagaimana tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat pada UUD 1945 alinea ke-4, yang berbunyi: Alinea IV (Keempat), "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Selain itu, karena membawa nama Islam di dalam namanya, Hima Persis juga memiliki peran dan tanggung jawab menjaga martabat Islam dan mendukung kemajuan umat Islam Indonesia.

Secara spesifik peran Hima Persis didorong, oleh bait dalam QA-QD Hima Persis, bahwa tujuan dari Hima Persis ialah berupaya mewujudkan 'Peradaban Ulul Albab' dengan kerja-kerja nyata. Bahwa kader-kader Hima Persis memiliki kapabilitas diri untuk terjun di berbagai bidang; kader ekonomi, kader politik, kader dakwah, kader pendidikan, kader IT dan lain sebagainya.

4.1.3 Visi Hima Persis

Sebagai OKP sekaligus Ormawa yang memiliki cita-cita, Hima Persis tentu harus memiliki visi. Setidaknya Hima Persis memiliki 3 visi⁴⁹, yaitu:

⁴⁹ *Loc. Cit.* Hlm. 83.

1. Visi Kejamiyyahan Hima Persis

Sebagai organisasi yang menjadi otonom dari Persis, tentu Hima Persis tidak boleh terlepas dari cita-cita ideal Persis. Itu menjadi tanggung jawab bagaimana keselarasan Hima Persis dengan induknya. Praktis, Hima Persis dituntut untuk bisa bagaimana mewujudkan masa depan Persis, dengan visi ini dinamakan visi kejamiyyahan. Visi ini sebagai sebuah ikhtiar dari Hima Persis untuk menjaga dan melanjutkan cita-cita dan tujuan Persis. Persis dengan tafaquh fiddinnya dan Persis sebagai harokah tajdid harus dijaga dan diteruskan oleh Hima Persis.

2. Visi Kenegaraan Hima Persis

Hima Persis sebagai bagian dari kelompok gerakan mahasiswa dan juga komponen kebangsaan. Dengan begitu, gerakan dan pemikiran Hima Persis tidak boleh jauh-jauh dari model dan karakter gerakan khas mahasiswa, yaitu kekuatan intelektual dan politik moral. Hima Persis peduli terhadap masa depan bangsa dan negaranya. Tanggung jawab gerakan mahasiswa secara umum adalah kepada bangsa dan negara.

Hima Persis memandang agama dan negara tidak dapat dipisahkan, negara adalah tempat perjuangan mempertahankan nilai-nilai Islam. Secara historis, filosofis, dan juga yuridis agama Islam dan negara Indonesia memiliki ikatan yang sangat kuat, terlihat bagaimana Indonesia menjadi negara yang penduduknya mayoritas umat Islam dibandingkan negara-negara lain di Indonesia. Hima Persis harus siap mengabdikan pada negara, baik

dengan duduk di kursi pemerintahan atau menjadi masyarakat sipil dengan terus berjuang keras untuk Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Visi Internasionalisme Hima Persis

Hima Persis sebagai bagian dari umat Islam secara umum dan juga ada nama Persatuan Islam harus ikut serta dalam kemajuan Islam. Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar di dunia, itu menjadi tanggung jawab tersendiri bagi umat Islam terkhusus Hima Persis untuk aktif dalam menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban Islam, dengan bermodalkan sumberdaya alam yang mumpuni.

Sedikit banyaknya Indonesia tidak akan dipandang sebelah mata di dunia internasional. Dengan semua yang dimiliki sebagai modal, negara Indonesia bisa menjadi pusat peradaban dunia, khususnya dunia Islam. Hima Persis tidak boleh absen dengan kesempatan tersebut dan harus mempunyai visi besar ke depan untuk mewujudkan semua itu. Ini mungkin tampak utopis, tetapi tidak ada yang mustahil.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Hima Persis dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menjadi satu elemen atau entitas yang sangat penting di tengah masyarakat, karena bagaimanapun OKP atau organisasi mahasiswa itu dipandang memiliki klaster sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya. Artinya dia dipandang sebagai kaum intelektual yang lebih dari pada masyarakat umumnya, baik dari aspek kognitif ataupun afektif ataupun dalam konteks tindakannya. Artinya ada harapan dari masyarakat terhadap mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam

sebuah organisasi kepemudaan. Atas dasar itu kehadiran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam menumbuhkan semangat demokrasi di masyarakat itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, ada peran yang signifikan yang harus dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda agar kemudian masyarakat paham sedikitnya apa itu demokrasi dan bagaimana cara berdemokrasi yang baik.

Salah satu kunci yang memainkan peranan itu bisa dimulai dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dalam konteks yang lebih spesifik misalkan dalam konteks pemilu di Indonesia jelas yang harus kemudian dipahamkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda kepada masyarakat itu bukan hanya sebatas bagaimana berpartisipasi menjadi pemilih atau bahkan menjadi kontestan dalam konteks pemilu itu tapi yang lebih penting itu bagaimana Organisasi Kemasyarakatan Pemuda bisa memainkan peran yang bersifat edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya menjadi objek demokrasi atau pemilu yang didekati hanya pada saat momentum hajatan pemilu tapi kemudian tidak diedukasi, disinilah peran yang berkelanjutan yang mesti dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda mampu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun para kadernya.

Hima Persis memiliki rencana, program, ataupun kegiatan yang terkait politik Pemilu 2024. Tentu dengan tujuan untuk membangun kepribadian politik, menumbuhkan kesadaran politik, dan juga mendorong partisipasi aktif yang awalnya ditargetkan untuk para kader dengan nanti bisa

dihadirkan juga di masyarakat luas. Hima Persis pernah mengadakan Sekolah Kebijakan yang mana didalam suatu bahasannya membahas mengenai kebijakan pemilu 2024, kemudian Hima Persis pernah mengadakan Symposium Hima Persis Jawa Barat dimana ada dua pembahasan pada kegiatan itu. Pertama membahas terkait politik kemandirian pada 2024 nanti, jadi bagaimana sipil melihat potensi konflik yang ada pada Pemilu 2024 sehingga memang tujuannya supaya Hima Persis sebagai organisasi mahasiswa bisa mengantisipasi potensi konflik yang hadir atau adanya perpecahan. Hima Persis bersentuhan dengan masyarakat ataupun dengan kader untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Kedua diagenda Symposium itu dijelaskan bagaimana peran pemuda dalam politik yang mana pada acara tersebut juga diisi oleh politisi muda Persis yaitu Kang Zamzam, Kang Zamzam ini akan mencalonkan diri lewat salah satu partai. Beliau menjelaskan bahwa kaum muda Persis mesti memiliki peran dalam politik baik itu secara ide maupun praktisnya.⁵⁰

4.2.2 Pemikiran Hima Persis terkait Sosialisasi Politik Pemilu 2024

Hima Persis mendefinisikan sosialisasi politik ini adalah bagian trilogi Hima Persis yaitu intelektualitas, perubahan iklim politik, dan perubahan sosial. Pada konteks intelektualitas tentunya itu adalah bagian dari membangun nalar intelektual melalui budaya-budaya intelektual yaitu membaca, menulis, diskusi dan lain sebagainya, disitulah kemudian

⁵⁰ Wawancara dengan Yanuar, Koordinator Bidang Politik Kebijakan Publik PW Hima Persis Jawa Barat, tanggal 28 Juni.

menjadi awal dari bagaimana seseorang mengejawantahkan dengan perubahan iklim politik.⁵¹

1. Pentingnya OKP melakukan Sosialisasi Politik

Konteks sosialisasi politik yang dilakukan oleh OKP itu sangat penting karena bagaimanapun mentransformasikan ruang lingkup politik atau ruang lingkup kenegaraan ini adalah dengan melalui sosialisasi politik, mau tidak mau politik bagi OKP ataupun bagi organisasi mahasiswa sekalipun itu adalah suatu hal yang menjadi keharusan. Sesuai dengan ide dan cita-cita yang diharapkan Hima Persis berkaitan dengan peradaban Ulul Albab sosialisasi politik ini menjadi medium untuk mengejawantahkan perubahan sosial di masyarakat. Sasarannya itu pun begitu banyak yang diharapkan oleh Hima Persis, pertama yaitu kader sendiri, kemudian ruang lingkup terdekat yaitu keluarga, dan kemudian yang terakhir yaitu masyarakat diluar sana ataupun khalayak umum.

Tentu sangat jelas sosialisasi politik itu menjadi suatu hal yang sangat penting karena *frame* yang dibangun oleh seseorang itu ditentukan bagaimana dia berdialog, bagaimana dia berdiskusi, dan bagaimana dia membangun dialektika dengan siapapun itu yang menjadi subjek dialognya itu sendiri, dalam konteks membangun sosialisasi politik sikap politik itu ditentukan oleh bangunan *frame* yang dibangun. Oleh karena itu untuk mewujudkan apa yang dicita-

⁵¹ Wawancara dengan Amirul Muttaqien, Ketua PW Hima Persis Jawa Barat, tanggal 25 Juni.

ciptakan oleh satu organisasi kepemudaan atau suatu organisasi kemahasiswaan tentunya dalam konteks sikap politik, sosialisasi politik ini menjadi peran yang paling dominan dalam menentukan suatu sikap politik, baik itu bentuk partisipasi dari personal maupun bentuk partisipasi secara keorganisasian.⁵²

2. Ulul Albab Hima Persis

Sesuai dengan visi dan misi dari Hima Persis yaitu membangun dan menciptakan peradaban Ulul Albab, tentunya Ulul Albab ini satu hal yang cukup kompleks dan universal dalam mendefinisikan personifikasi kekaderan yang ada di Hima Persis, karena diorientasikan dan dicita-citakan untuk membangun peradaban Ulul Albab, artinya itu tidak hanya dilakukan terhadap kader Hima Persis saja tetapi kemudian itu perlu dilakukan untuk masyarakat umum. Berangkat dari hal itu program-program yang dicanangkan itu berorientasi kesana untuk menunjang atau setidaknya mengarah kepada hal-hal yang diharapkan.

Sesuai dengan yang diharapkan bahwa peradaban Ulul Albab itu akan tercipta ketika nalar intelektualitas kader dan masyarakat sudah cukup mumpuni dalam melakukan transformasi, setelahnya maka tahap kedua itu membangun perubahan iklim politik. Hari ini kenapa perubahan iklim politik itu menjadi penting? Karena kita ketahui bersama hari ini iklim politik di Indonesia masih

⁵² *Ibid*

berorientasi pada hal-hal materil bukan berorientasi dan bercita-cita membangun keadilan, menciptakan kesetaraan, dan lain-lain. Karena hal itulah kemudian iklim politik Indonesia ini perlu dilakukan perubahan pada taraf itu, sehingga ketika pada taraf itu sudah terealisasi, maka tahap selanjutnya adalah perubahan sosial dimana masyarakat itu menjadi sejahtera, menjadi berdaya, merasakan kenyamanan dan keamanan untuk hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, sehingga disitulah kemudian masyarakat di Indonesia memiliki apa yang dicita-citakan Hima Persis yaitu peradaban Ulul Albab. Lebih jauhnya, berbicara kaitan dengan Ulul Albab ini dimana seseorang itu memiliki kesadaran teologis dan memiliki kesadaran sosial dan politik. Secara personal dia selesai dengan tuhan nya, secara sosial dia selesai dengan membangun masyarakat lewat peradaban yang tadi diharapkan.

3. Hima Persis dan Pemilu 2024

Hima Persis ingin di kontestasi 2024 nanti bisa lebih mengakomodir generasi muda, karena 5 tahun kedepan bahkan sampai puncak bonus demografi 2035 kemudian seabad Indonesia atau Indonesia emas 2045 itu angkatan generasi milenial dan Z menjadi penerus dan penentu bagaimana republik ini kedepan, sehingga kontestasi atau momentum 2024 ini sebisa mungkin untuk bisa bagaimana kepentingan anak muda menjadi yang utama, kemudian ruang-ruang untuk anak muda dibuka, dan segala ide dan

gagasan dari anak muda yang konstruktif kemudian diambil, diserap dan diaplikasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan produktif kedepannya oleh berbagai kandidat yang mencalonkan baik di legislatif maupun eksekutif.

Pertama, kepentingan generasi muda yang kemudian harus diutamakan, bukan hanya sebagai objek politik tapi dia juga sebagai subjek politik yang harus diberi ruang lebih atau porsi lebih, idenya diakomodir dan ruang-ruangnya dibuka seluas mungkin, kemudian apa yang baik bisa diimplementasikan. Kedua, berkenaan dengan perubahan iklim, bagaimana kebijakan kedepan itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan iklim atau kebijakan hijau sehingga ada keadilan antar generasi berkenaan dengan kelestarian lingkungan sehingga generasi hari ini tidak mewariskan hal-hal yang kurang baik ke generasi selanjutnya tapi mewarisi lingkungan yang baik. Hal itu yang harus menjadi poin penting juga yang ditonjolkan dalam kontestasi atau momentum 2024 oleh semua kandidat, pasangan calon, atau yang maju di pemilu 2024 berkenaan dengan isu lingkungan, perubahan iklim ini harus menjadi arus utama ke depan. Ketiga, berkenaan dengan ekonomi dan teknologi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan membangun efektivitas dengan kemajuan teknologi. Ketiga hal ini menjadi poin penting yang bisa diutamakan bisa dihadirkan idenya di momentum 2024 dan bisa diimplementasikan siapapun

kandidasi yang menang. Hima Persis sebagai OKP dan juga organisasi mahasiswa hanya mengawal daripada gerakan-gerakan intelektual dan moral, pengedukasian, moral politik, dengan program-program yang sudah dirumuskan dan formulasikan.⁵³

4.2.3 Gerakan Hima Persis terkait Sosialisasi Politik Pemilu 2024

Sosialisasi Politik yang dilakukan Hima Persis terkait dengan Pemilu 2024, tentunya untuk mengantisipasi dan mengkampanyekan agar praktik-praktik ataupun isu yang berkembang tidak secara bebas mempengaruhi kader dan juga masyarakat umum. Hari ini isu-isu intoleransi mulai berkembang, isu-isu perpecahan mulai berkembang juga, dengan dilakukannya sosialisai politik harapan untuk 2024 ini masyarakat ini tidak terpecah, masyarakat ini tetap ada pada *rules*-nya, masyarakat tetap ada pada jalurnya. Karena hal itu kemudian Hima Persis hari ini aktif dalam melakukan sosialisasi politik sebagai upaya untuk bagaimana membangun stabilitas, kondusifitas, dan lain sebagainya dalam menghadapi momentum Pemilu 2024 yang akan datang.

1. Indepedensi Hima Persis

Secara keorganisasian tentunya Hima Persis ini tidak boleh secara praktis dalam mengkampanyekan sosok politik baik itu tingkat legislatif ataupun eksekutif, karena bagaimanapun identitas Hima Persis sebagai salah satu OKP dan juga organisasi mahasiswa di Indonesia dimana mahasiswa ini adalah katalisator rakyat kepada birokrat ataupun

⁵³ Wawancara dengan Ilham Nur Hidayatullah, Ketua Umum Hima Persis, tanggal 6 Juli.

pemerintah. Dalam konteks mengkampanyekan legislatif ataupun eksekutif ataupun kontestan yang maju dalam pesta demokrasi 2024 nanti Hima Persis tidak terlibat secara keroganisasian, tetapi jika untuk membangun konsolidasi-konsolidasi yang sehat, membangun narasi-narasi yang diharapkan, berbicara terkait keadilan dan kesejahteraan, pemerataan kekayaan dan lain-lain tentunya itu bisa dibicarakan secara khusus dengan sosok politik, tetapi perlu digarisbawahi bahwa itu semua tanpa ikut terlibat mengkampanyekannya. Hima Persis hanya mendialogkan secara intensif dengan mereka supaya nanti mereka membawa ide dan gagasan dari Hima Persis untuk membangun masyarakat nantinya menjadi lebih ideal dan lebih baik.⁵⁴

Hal yang diatas merupakan gerakan Hima Persis terkait dengan Pemilu 2024 nanti, tidak pada arus mengkampanyekan sosok yang akan maju pada sebuah pemilu. Hima Persis terbuka kepada siapapun untuk membangun komunikasi politik tentu hal itu untuk kepentingan masyarakat banyak, tapi perlu digaris bawahahi bahwasanya Hima Persis tidak terafiliasi dengan kandidat, partai politik dan siapapun.

2. Motif Hima Persis melakukan Sosialisasi Politik

Setiap orang harus menggunakan partisipasi politiknya, karena bicara politik berarti bicara hajat hidup orang banyak, bicara dari kita bangun sampai tidur, dari kecil sampai tua, dari hidup sampai mati,

⁵⁴ Wawancara dengan Yanuar, Koordinator Bidang Politik Kebijakan Publik PW Hima Persis Jawa Barat, tanggal 28 Juni.

artinya hak politik seseorang itu perlu digunakan dengan sebaik mungkin dan setepat mungkin. Adanya sosialisai politik diharapkan bisa mengarahkan masyarakat umumnya dan juga kader khususnya untuk berpartisipasi menggunakan hak politiknya dengan sebaik mungkin hingga bisa memberikan perubahan yang berarti dan signifikan untuk agama dan bangsa ini kedepannya. Tentu Hima Persis sebagai organisasi mahasiswa memiliki motif untuk kemudian mendorong partisipasi masyarakat dengan harapan dengan bisa tingginya kesadaran atau meleknya masyarakat ataupun para kader terhadap politik ataupun pemilu, karena momentum pemilu itu penting untuk kemudian kita ikut andil dan berpartisipasi dalam proses pemilu tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Implikasi OKP dengan Politik

Tidak dapat dipungkiri organisasi kepemudaan dan mahasiswa seyogynya menjadi laboratorium SDM yang siap mengisi ruang-ruang yang dibutuhkan bangsa dan negara, baik itu pendidikan dan budaya, ekonomi-bisnis, maupun politik dan hukum. Sebuah keniscayaan ketika OKP terlibat secara aktif dalam aktivitas politik kebangsaan, karena bagaimanapun OKP itu salah satunya bertujuan mencetak kader-kader pemimpin untuk menjadi kader pemimpin bangsa dimana untuk menjadi seorang pemimpin dia harus memiliki pengalaman, mentalitas, mindset dan tentu itu semua bisa didapatkan dari bagaimana dia terlibat secara aktif dalam dinamika politik.

Artinya mahasiswa atau anggota dari OKP itu akan terus bersinggungan dengan aktivitas dan dinamika politik kebangsaan yang ada.⁵⁵

Hampir semua OKP termasuk Hima Persis yang disitu ada keharusan menjaga idealisme organisasi yang tidak boleh melaksanakan aktivitas politik praktis. Dalam konteks yang lain diluar daripada implikasi negatif atau positif dalam konteks hubungan antara OKP dengan Politik, OKP harus sadar dan juga harus tercerahkan dengan dinamika politik yang ada karena itu adalah bagian dari keniscayaan yang tidak bisa dilepaskan. Tapi yang dalam konteks yang sifatnya lebih idealis yang kemudian OKP itu mampu tidak untuk menjaga nilai idealisme mereka ditengah dinamika politik yang ada.

OKP menjadi satu elemen atau entitas yang sangat penting untuk menumbuhkan semangat demokrasi di tengah masyarakat, karena bagaimanapun OKP atau organisasi mahasiswa itu dipandang memiliki klaster sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya, artinya dia dipandang sebagai kaum intelektual yang lebih dari pada masyarakat umumnya, baik dari aspek kognitif ataupun afektif ataupun dalam konteks tindakannya. Artinya ada harapan dari masyarakat terhadap mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan. Karena atas dasar itu, kehadiran organisasi kepemudaan dalam menumbuhkan semangat demokrasi di masyarakat itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, ada peran yang signifikan yang harus dilakukan oleh

⁵⁵ Wawancara dengan Ridwan Rustandi, Tokoh Masyarakat/Aktivist, tanggal 20 Juli.

OKP agar kemudian masyarakat paham sedikitnya apa itu demokrasi dan bagaimana cara berdemokrasi yang baik.⁵⁶ Salah satu kunci yang memainkan peranan itu bisa dimulai dari OKP, dalam konteks yang lebih spesifik misalkan dalam konteks pemilu di Indonesia jelas yang harus kemudian dipahamkan oleh OKP kepada masyarakat itu bukan hanya sebatas bagaimana berpartisipasi menjadi pemilih atau bahkan menjadi kontestan dalam konteks pemilu itu tapi yang lebih penting itu bagaimana OKP bisa memainkan peran yang bersifat edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya menjadi objek demokrasi atau pemilu yang didekati hanya pada saat momentum hajatan pemilu tapi kemudian tidak diedukasi. Disitulah peran yang berkelanjutan yang mesti dilakukan OKP mampu tidak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang seharusnya berdemokrasi dengan ideal.

Secara keorganisasian tentunya Hima Persis dan juga suatu OKP di Indonesia tidak boleh secara praktis dalam mengkampanyekan sosok politik baik itu tingkat legislatif ataupun eksekutif, karena bagaimanapun identitas Hima Persis sebagai OKP dan Ormawa dimana mahasiswa ini adalah katalisator rakyat kepada birokrat atau pemerintah. Hima Persis mempunyai kepentingan jika untuk membangun konsolidasi-konsolidasi yang sehat, membangun narasi-narasi yang baik, berbicara terkait keadilan dan kesejahteraan, pemerataan kekayaan dan lain-lain itu tentunya kita bicarakan secara khusus dengan sosok politik baik itu dengan anggota

⁵⁶ *Ibid*

legislatif dan eksekutif ataupun dengan para calon, tanpa kita ikut terlibat mengkampanyekannya.

Implikasi Hima Persis dengan Politik tentunya Hima Persis masih memegang teguh identitasnya, dan juga memandang bahwa implikasinya ada politik praktis dan politik moral. Hima Persis tetap ada pada gerakan politik moral, dimana *morality of humanity* atau moralitas kemanusiaan itu menjadi nilai yang paling utama yang harus diperbincangkan dan didiskusikan, tidak hanya dalam menghadapi 2024 saja tetapi diberbagai momentum yang ada di kehidupan ini tentunya itu bisa diejawantahkan dengan membangun atau mengadvokasi masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, itu adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun gerakan moralitas tadi, dalam konteks momentum 2024 nanti tentunya moralitas-moralitas itulah yang tentunya yang kita diskusikan dengan orang-orang yang berkontestasi di 2024 nanti.⁵⁷

Bicara politik selalu ada hubungannya dengan kebijakan publik, putusan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hima Persis sebagai gerakan mahasiswa, kaum akademika, gerakan intelektual berkewajiban bagaimana mengawal setiap kebijakan, jika kemudian kebijakan itu dianggap tidak pro rakyat atau tidak maslahat kemudian Hima Persis akan berusaha mengkritisi, melakukan protes atau demonstrasi, ataupun dengan cara lain seperti diskusi ataupun audiensi untuk bisa dihadirkan solusinya.

⁵⁷ Wawancara dengan Amirul Muttaqien, Ketua PW Hima Persis Jawa Barat, tanggal 25 Juni.

Jadi jika berbicara implikasi Hima Persis dengan Politik secara khusus ataupun secara umum sebagai salah satu OKP di Indonesia, tentu implikasinya tidak dapat lepas dengan bagaimana Hima Persis ataupun OKP lain yang akan menjadi garda terdepan jika berkaitan dengan khalayak umum, dan di Hima Persis itupun terjadi di setiap level pimpinan, di level komisariat misalkan bagaimana mereka mengkritisi kebijakan rektorat atau pimpinan kampus kemudian mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pro mahasiswa, di daerah berkaitan isu-isu kedaerahan, di wilayah dengan isu kewilayahannya, di pimpinan pusat dengan isu-isu nasionalnya. Di setiap level pimpinan mempunyai peran politiknya masing-masing yang berhubungan dengan kebijakan politik, karena sosialisasi politik berkaitan dengan hubungan masyarakat dengan kekuasaan, dan diantaranya bagaimana kebijakan keluar berhubungan dengan masyarakat yang pro atau merugikan. Dengan demikian, dimensi politik sangat penting di Hima Persis, itu diejawantahkan dengan Hima Persis menjadi mitra strategis dan mitra kritis dari pemerintah.⁵⁸

Sosialisasi politik sangat penting dilakukan oleh mahasiswa atau OKP karena sosialisasi ini sangat menentukan persepsi dan karakter politik seseorang atau katakanlah karakter pemilih untuk konteks 2024, karena apa yang kemudian disosialisasikan ke kader atau masyarakat luas ini akan menjadi referensi bagi mereka bahkan akan menjadi tolak ukur bagaimana menentukan sikap dan langkah-langkah politik ke depan, sehingga dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Ilham Nur Hidayatullah, Ketua Umum Hima Persis, tanggal 6 Juli

adanya sosialisai politik yang dijalankan secara baik dan massif ini akan membantu kader dan masyarakat dalam mengetahui hak dan kewajiban politiknya. Dengan sosialisai politik diharapkan masyarakat akan tercerahkan dan juga akan lebih terbangun wawasannya, akan lebih terdalami pengetahuan politiknya dan akan lebih tercerdaskan dalam menggunakan hak politiknya, baik itu hak politik dalam keseharian ataupun hak politik dalam momentum 5 tahunan seperti 2024 nanti.⁵⁹

Penting bagi mahasiswa atau OKP untuk hadir dan *live in atau* terlibat langsung di masyarakat menjadi fasilitator yang bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sosialisasi politik dimaksudkan untuk memberikan pencerahan politik kepada masyarakat khususnya para anggota dari suatu OKP dan ini akan membawa pengaruh yang cukup penting, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang kurang tepat, tidak mudah memakan hoak politik, tidak mudah dikelabui oleh isu-isu yang tidak benar sehingga dengan adanya sosialisasi politik yang kemudian diteruskan oleh kader ke keluarganya, temannya, atau masyarakat luas, ini bisa menjadi modal penting untuk menghadirkan politik yang lebih cerdas dalam menentukan pilihannya ataupun dalam mengawal ataupun mengkritisi setiap kebijakan politik, dengan adanya sosialisai politik itu diharapkan menjadi modal agar seseorang bisa memfiltrasi bisa lebih mengoptimalkan hak politiknya sebaik mungkin.

⁵⁹ *Loc. Cit*

Hima Persis merupakan organisasi kemahasiswaan dengan cita-cita dan ideologi perjuangan yang amat luhur, dengan mendasarkan gerakannya pada ayat-ayat AL Qur'an, Hima Persis bertekad untuk mewujudkan peradaban Ulul Albab dalam seluruh aspek kehidupan. Hingga hari ini Hima Persis berkiprah selama 27 tahun sejak berdirinya di tanggal 24 Maret 1996. Selama perjalanannya Hima Persis telah berkembang menjadi salah satu organisasi mahasiswa ekstra yang memiliki catatan-catatan yang cukup baik.

Namun pada hari ini memasuki era baru pada abad 21 Hima Persis dituntut untuk melakukan lompatan-lompatan kualitatif yang jauh lebih baik lagi untuk mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka kader secara personal dituntut untuk terus meningkatkan kapabilitas agar mampu membawa perubahan positif bagi institusi Hima Persis. Hima Persis secara institusional dituntut agar terus melakukan pembaharuan pada wilayah suprastruktur dan infrastruktur keorganisasiannya agar Hima Persis dapat relevan bagi segala zaman dan tempat.

Berkenaan dengan gerakan politik atau konsepsi politik yang dihadirkan oleh gerakan mahasiswa atau OKP itu tentu berbeda dengan gerakan politik praktis, gerakan politik yang dihadirkan oleh mahasiswa atau OKP tentu ini lebih kepada edukasi politik, moral politik, dan sosialisasi hak dan kewajiban politik. Tiga hal ini penting untuk kemudian dihadirkan dalam internal organisasi termasuk juga di Hima Persis yang

kemudian perlu dihadirkan juga di masyarakat luas melalui sosialisai politik ataupun pendidikan politik. Upaya yang dilakukan oleh Hima Persis untuk menghadirkan edukasi politik yaitu dengan menjaga moral politik ataupun menjaga *rules* kemurnian politik itu sendiri, jangan sampai kemudian politik bertentangan dengan hukum yang ada. Artinya Hima Persis akan senantiasa menjaga konstitusi menjaga peraturan bagaimana pesta demokrasi itu berlangsung dengan semestinya. Jadi bagaimana OKP dalam konsepsi gerakan politik, Hima Persis lebih kepada edukasi politik dan moral politik dengan sosialisasi yang massif mulai dari Pimpinan Komisariat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah sampai ke pimpinan tertingginya yaitu Pimpinan Pusat, tentu itu dengan berbagai bentuk yang diejawantahkan dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang non formal.

Misalkan dari Pimpinan Pusat dalam kepemimpinan Ilham Nur Hidayatullah mengusung Tiga Transformasi yaitu Transformasi Organisasi Pengkaderan, Transformasi Ekonomi dan Teknologi, dan Transformasi Iklim Politik, dalam Transformasi Iklim ini mempersiapkan kader yang memiliki gagasan bersih, cemerlang, dan modern, membangun kemitraan dengan lembaga nasional, membangun jejaring konektivitas internasional, untuk kemudian berkontribusi nyata dalam untuk mendorong bangsa dan negara menjadi bangsa dan negara makmur, maju, dan bermartabat di mata dunia, melalui ruang-ruang strategis yang sudah terpetakan. Transformasi Iklim Politik ini dimaksudkan dan menjadi upaya dari Hima Persis untuk menghasilkan kader negarawan yang bisa menempati posisi strategis di

perpolitikan tanah air, sebagai manifestasi demokrasi Hima Persis di Era Disrupsi, sehingga diharapkan kader dari Hima Persis menjadi pelopor *Green Policy* di masyarakat. Itu semua ditopang dengan beberapa program seperti Sekolah Negarawan, *Virtual Democracy*, dan juga Gerakan *Green Policy*.

Di Pimpinan Wilayah misalkan program-program dari Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat itu menjadi dan berorientasi kepada bangunan sikap politik atau bangunan kesadaran politik yang dimiliki masing-masing individu baik itu kader secara khusus dan secara umumnya pada masyarakat umum, program-program yang dicanangkan oleh Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat seperti misalkan Pendidikan Politik Kader, Madrasah Politik, Sekolah Kebijakan Publik, dan lain-lain. Itu jika berbicara dari sedikit banyaknya program-program formal, ada juga melalui ruang-ruang non formal seperti obrolan-obrolan, diskusi, dan lain sebagainya. Itu di orientasikan untuk membangun sikap politik dan tentunya untuk membangun kesadaran itu diperkukan *tools* dan cara-cara atau metodologi yang tentunya pas dan tepat supaya kader dan masyarakat umum itu bisa paham betul bagaimana cara melakukan atau mengaplikasikan sosialisasi politik yang didapatkan untuk membangun persepsi dan sikap politik dan lebih jauhnya nanti kader dan masyarakat itu diharapkan berpartisipasi secara aktif atau ikut andil dalam perpolitikan baik itu secara moral, menunaikan hak politiknya, ataupun dengan terjun ke

politik praktis jika ada kesempatan dengan niat yang tulus dan juga membawa kepentingan dari masyarakat.

4.3.2 Analisis menggunakan Teori Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dipahami sebagai proses yang dapat mengarahkan individu untuk lebih memahami sistem politik, yang kemudian menentukan persepsi dan tanggapan mereka mengenai fenomena politik, dapat berupa masukan, kritik ke orang-orang yang menjalankan suatu pemerintahan. Itu karena tidak terlepas dari fungsi sosialisasi politik itu sendiri yang menurut Rush dan Althoff adalah membentuk individu dan memelihara sistem politik.

Hari ini Hima Persis aktif melakukan sosialisasi politik karena sosialisasi politik ini dipandang sebagai bagian dari trilogi Hima Persis yaitu intelektualitas, perubahan iklim politik, dan perubahan sosial. Pada konteks intelektualitas tentunya itu adalah bagian dari membangun nalar intelektual melalui budaya-budaya intelektual tentunya yaitu membaca, menulis, diskusi dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi awal dari bagaimana kemudian pengejawantahan dari mengupayakan perubahan iklim politik, karena sesuai dengan ide dan cita-cita yang diharapkan Hima Persis kaitan dengan peradaban Ulul Albab.

Selain karena motif keinternalan organisasi Hima Persis yaitu ingin mewujudkan peradaban Ulul Albab, sosialisasi politik yang dilakukan oleh OKP Hima Persis itu sangat penting karena tidak terlepas dari fungsi dari sosialisasi politik itu sendiri, selaras dengan yang dikemukakan Rush dan Althoff yaitu membentuk individu dan juga memelihara sistem politik yang

ada. Sosialisasi politik ini menjadi medium untuk mengupayakan perubahan sosial di masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri OKP dan organisasi kemahasiswaan itu menjadi laboratorium SDM yang nantinya siap mengisi ruang-ruang yang dibutuhkan bangsa dan negara, baik itu pendidikan dan budaya, ekonomi-bisnis, maupun politik dan hukum. Sebuah keniscayaan ketika OKP terlibat secara aktif dalam aktivitas politik kebangsaan, karena bagaimanapun OKP itu salah satunya tujuannya untuk menghasilkan kader pemimpin bangsa dimana untuk menjadi seorang pemimpin dia harus memiliki pengalaman, mentalitas, mindset dan tentu itu semua bisa didapatkan dari bagaimana dia terlibat secara aktif dalam dinamika politik.

OKP menjadi satu elemen atau entitas yang sangat penting untuk menumbuhkan semangat demokrasi di tengah masyarakat, karena bagaimanapun OKP atau organisasi mahasiswa itu dipandang memiliki klaster sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya, artinya dia dipandang sebagai kaum intelektual yang lebih dari pada masyarakat umumnya, baik dari aspek kognitif ataupun afektif ataupun dalam konteks tindakannya. Artinya ada harapan dari masyarakat terhadap mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan. Karena atas dasar itu, kehadiran organisasi kepemudaan dalam menumbuhkan semangat demokrasi dan menjadi agen sosialisasi politik di tengah-tengah masyarakat itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, ada peran yang signifikan yang harus dilakukan oleh OKP.

Sosialisasi politik tidak terjadi begitu saja, ia dilakukan oleh berbagai aktor dan agen. Setiap masyarakat mempunyai agen atau aktor yang berfungsi mengembangkan dan mentransformasikan pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai politik. Sosialisasi politik membutuhkan agen ataupun aktor dalam penyampaiannya. Agen dan aktor ini memegang peranan penting karena merekalah yang memberikan pengetahuan mengenai segala aspek politik yang nantinya menjadi doktrin mengenai nilai dan norma yang disampaikan. Rush dan Althoff mengemukakan lima agen sosialisasi politik yaitu keluarga, sekolah, *peers group*, media massa, dan pemerintah.

Dalam dewasa ini, jika ditelisik OKP pada saat ini bisa menjelma menjadi agen sosialisasi politik dengan termasuk kategori *peers group*. *Peers group* ini adalah lingkungan yang mengelilingi seseorang individu atau yang berisikan kumpulan teman sebaya dari lingkungan terdekat yang bisa mempengaruhi tindakan hingga kebiasaan seseorang dalam kegiatan politik. Apalagi OKP sering diidentifikasi berisikan anak muda dan kebanyakan dari anggotanya adalah mahasiswa atau kelompok terpelajar.

Agen atau aktor sosialisasi politik yang lain menurut Rush dan Althoff selain dari *peers group* adalah keluarga, sekolah, media massa, dan pemerintah. Hima Persis dengan falsafah perjuangannya yaitu Ilmiah, Progresif, dan Revolusioner. Hal ini diejawantahkan dengan semangat langkah strategis yang sudah dirumuskan dalam trilogi Hima Persis diatas, yaitu intelektualitas yang diartikan sebagai kesadaran gerakan intelektual, transformasi sosial yang diartikan sebagai kesadaran gerakan sosial, dan

perubahan iklim politik yang diartikan sebagai kesadaran politik etik.⁶⁰ Ini bisa diwujudkan dengan Hima Persis menyiapkan kader atau mencetak kader untuk menjadi agen dari sosialisasi politik baik itu diarah sekolah, keluarga, pemerintah ataupun di masyarakat umum sesuai dengan peradaban Ulul Albab.

Hal itu didukung dengan bagaimana Hima Persis sangat memberikan ruang untuk para kader untuk berdiskusi mengkaji isu-isu politik mulai dari pimpinan yang paling bawah yaitu Pimpinan Komisariat mengkaji tentang isu-isu politik kampus, dari Pimpinan Daerah mengkaji isu-isu politik atau kebijakan kampus atau pemerintah kedaerahannya, di Pimpinan Wilayah dengan isu-isu kewilayahannya, dan di pimpinan teratasnya yaitu Pimpinan Pusat dengan isu-isu nasionalnya.⁶¹ Ditambah dengan program-program yang ada, itu dimaksudkan untuk menjadi bekal untuk para kader yang notabenehnya mahasiswa yang melekat padanya *agent of change* ditambah Ulul Albab yang menjadi jati diri dari kader Hima Persis.

Menurut Rush dan Althoff terdapat tiga metode untuk melakukan kegiatan sosialisasi politik yaitu imitasi, intruksi, dan motivasi. Imitasi adalah peniruan terhadap perilaku individu-individu lain, dalam hal ini seorang kader atau anggota mempunyai patron untuk ditiru bisa alumni, senior, ataupun bisa meniru semangat dari Mohammad Natsir, Ahmad Hassan dan lain-lain yang

⁶⁰ <http://desyahid.blogspot.com/2010/01/ulul-albab-jati-diri-kader-hima-persis.html> (diakses pada tgl 4 Agustus, pukul 12.34)

⁶¹ Wawancara dengan Kholfan Faiz Mufidi, Kader Aktif Hima Persis Kota Bandung.

notabene ulama Persis sekaligus politikus. Kemudian metode intruksi, ini biasanya diwujudkan dengan proses pembelajaran yang ada di Hima Persis baik itu secara formal, informal, ataupun nonformal.

Metode formal di Hima Persis dimanifestasikan berupa program-program seperti Madrasah Negarawan, Pendidikan Politik, Sekolah Kebijakan Publik dan lain-lain. Informalnya dengan melalui diskusi-diskusi, dan nonformalnya bisa melalui *Personal Approach* atau pendekatan secara pribadi, melakukan obrolan ringan secara mendalam dari hati ke hati, sebelum nantinya berlanjut ke antar *Personal Approach*. Artinya kader ketika sudah selesai dan berhasil melalui pendekatan *Personal Approach* oleh organisasinya, dia disiapkan juga untuk melakukan pendekatan ke antar *Personal Approach* atau disiapkan untuk terjun ke luar dari organisasinya.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menjadi satu elemen atau entitas yang sangat penting di tengah masyarakat, karena OKP atau organisasi mahasiswa itu dipandang memiliki klaster sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya, ia dipandang sebagai kaum intelektual yang lebih dari pada masyarakat umumnya. Ada harapan dari masyarakat terhadap mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam sebuah organisasi kepemudaan. Atas dasar itu kehadiran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam menumbuhkan semangat demokrasi di masyarakat itu tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, ada peran yang signifikan yang harus dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda agar kemudian masyarakat paham sedikitnya apa itu demokrasi dan bagaimana cara berdemokrasi yang baik.

Salah satu kunci yang memainkan peranan itu bisa dimulai dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, dalam konteks yang lebih spesifik misalkan dalam konteks pemilu di Indonesia jelas yang harus kemudian dipahamkan oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda kepada masyarakat itu bukan hanya sebatas bagaimana berpartisipasi menjadi pemilih atau bahkan menjadi kontestan dalam konteks pemilu itu tapi yang lebih penting itu bagaimana Organisasi Kemasyarakatan Pemuda bisa memainkan peran yang bersifat edukatif kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya menjadi objek demokrasi atau pemilu yang didekati hanya pada saat momentum hajatan pemilu tapi kemudian tidak diedukasi, disinilah peran yang berkelanjutan yang mesti dilakukan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda mampu tidak memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun para kadernya.

Tujuan dari sosialisasi politik tidak terlepas dari upaya untuk membangun kepribadian politik, menumbuhkan kesadaran politik, dan juga mendorong partisipasi aktif. Hima Persis memiliki rencana, program, ataupun kegiatan yang terkait politik Pemilu 2024. Target yang awalnya untuk para kader dengan nanti diharapkan bisa dihadirkan juga di masyarakat luas. Untuk menghadirkan hal itu, Hima Persis melakukan beberapa upaya misalkan pernah mengadakan Sekolah Kebijakan yang mana didalam suatu bahasannya itu membahas mengenai kebijakan pemilu 2024, terus kemudian Hima Persis pernah mengadakan Symposium Hima Persis Jawa Barat dimana didalamnya membahas mengenai sipil melihat potensi konflik yang ada pada

Pemilu 2024 yang akan datang sehingga memang tujuannya supaya Hima Persis sebagai organisasi mahasiswa bisa mengantisipasi potensi konflik yang hadir atau adanya perpecahan. Pada agenda Symposium itu juga dijelaskan bagaimana peran pemuda dalam politik, dikatakan bahwa kaum muda Persis mesti memiliki peran dalam politik baik itu secara ide maupun praktisnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian dan juga pembahasan penelitian diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda menjadi satu elemen atau entitas yang sangat penting di tengah masyarakat, karena bagaimanapun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda atau organisasi mahasiswa itu dipandang memiliki klaster sosial yang berbeda dibandingkan masyarakat pada umumnya. Hima Persis memiliki rencana, program, ataupun kegiatan yang terkait politik Pemilu 2024. Tentu dengan tujuan untuk membangun kepribadian politik, menumbuhkan kesadaran politik, dan juga mendorong partisipasi aktif yang awalnya ditargetkan untuk para kader dengan nanti bisa dihadirkan juga di masyarakat luas. Kaum muda Persis mesti memiliki peran dalam politik baik itu secara ide maupun praktisnya.
2. Sosialisasi politik menurut Hima Persis adalah bagian dari trilogi Hima Persis yaitu intelektualitas, perubahan iklim politik, dan perubahan sosial. Konteks sosialisasi politik yang dilakukan oleh OKP itu sangat penting karena bagaimanapun mentransformasikan ruang lingkup politik atau ruang lingkup kenegaraan ini adalah dengan melalui sosialisasi politik, mau tidak mau politik bagi OKP ataupun bagi organisasi mahasiswa sekalipun termasuk Hima Persis adalah suatu hal yang menjadi keharusan. Sesuai dengan ide dan cita-cita yang diharapkan Hima Persis berkaitan dengan

peradaban Ulul Albab sosialisasi politik ini menjadi medium untuk mengejawantahkan perubahan sosial di masyarakat. Penting bagi mahasiswa atau OKP untuk hadir dan *live in atau* terlibat langsung di masyarakat menjadi fasilitator yang bisa memberikan pencerahan kepada kader dan masyarakat.

3. Berkenaan dengan gerakan politik atau konsepsi politik yang dihadirkan oleh gerakan mahasiswa atau OKP itu tentu berbeda dengan gerakan politik praktis, gerakan politik yang dihadirkan oleh mahasiswa atau OKP tentu ini lebih kepada edukasi politik, moral politik, dan sosialisasi hak dan kewajiban politik. Tiga hal ini penting untuk kemudian dihadirkan dalam internal organisasi termasuk juga di Hima Persis yang kemudian perlu dihadirkan juga di masyarakat luas melalui sosialisasi politik ataupun pendidikan politik. Upaya yang dilakukan oleh Hima Persis untuk menghadirkan edukasi politik yaitu dengan menjaga moral politik ataupun menjaga *rules* kemurnian politik itu sendiri, jangan sampai kemudian politik bertentangan dengan hukum yang ada. Artinya Hima Persis akan senantiasa menjaga konstitusi menjaga peraturan bagaimana pesta demokrasi itu berlangsung dengan semestinya. Konsepsi gerakan politik Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Hima Persis lebih kepada edukasi politik dan moral politik dengan sosialisasi yang massif mulai dari Pimpinan Komisariat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah sampai ke pimpinan tertingginya yaitu Pimpinan Pusat, tentu itu dengan berbagai bentuk yang

diejawantahkan dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang non formal.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di OKP Hima Persis, maka peneliti sedikitnya ingin memberikan kontribusi berdasarkan temuan-temuan dilapangan dengan memberikan saran sebagai berikut:

1. Personal Approach. Hal yang paling pokok atau yang paling penting adalah bagaimana OKP dengan sistem yang ada bisa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat pada level yang sifatnya personal. Jadi tingkatan pertama ke level personal dulu, artinya pendekatan personal itu dilakukan dengan bersifat pribadi, dimulai dari bagaimana membangun kecerdasan berdemokasi, kesadaran berdemokrasi termasuk budaya berdemokrasi yang di lingkungan internal organisasi dulu. Artinya sebelum dia melakukan pendekatan ke masyarakat harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Ini menjadi modal karena nanti anggota yang ada di OKP itu akan menjadi agen, fasilitator, katalisator dan lain sebagainya yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana cara dia melakukan pendekatan kepada masyarakat diluar dari organisasinya.
2. Antar Personal Approach. Pendekatannya sudah naik kelas tidak lagi pada yang sifatnya personal tetapi lebih ke antar personal, tantangannya ketika antar personal ini bisa dilakukan metode yang efektif adalah bagaimana pada saat OKP ini mampu mengedukasi masyarakat tertentu apalagi tokoh kunci yang ada masyarakat disitu, tokoh kunci itu yang nantinya akan menjadi tutor bagi lingkungan sekitarnya. Nantinya OKP ini dengan metode

personal approach itu bisa menciptakan tutor yang justru berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri dengan tokoh-tokoh yang ada disana.

3. Institutional Approach. Pendekatan institusional, pendekatan ini lebih ke pendekatan formal misalkan metode yang dipakai dengan seminar, FGD, atau OKP yang bekerja sama dengan pemerintah seperti Bawaslu atau KPU.
4. Agar sosialisasi politik yang dilakukan oleh OKP itu efektif maka balik lagi ke basic OKP itu sendiri, karena namanya organisasi kepemudaan atau mahasiswa akan lebih efektif jika sosialisasi itu dilakukan secara *segmented*, walaupun tidak menutup kemungkinan OKP nantinya terlibat dalam mensosialisaikan kepada khalayak masyarakat luas. Tapi dengan berbagai alasan misalkan bonus demografi yang kebanyakan generasi muda dan lain-lain akan lebih efektif jika sasaran dari proses sosialisasi yang dilakukan OKP itu *segmented*.


DAFTAR PUSTAKA

- Aliuddin, Nur. 2019. *Peran Organisasi Kepemudaan (OKP) terhadap Pendidikan Politik bagi Generasi Muda di Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Andreas, Bolo. 2013. *Peran Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Wilayah Kota Bandung dalam Memelihara Rasa Nasionalisme*. Laporan Penelitian. Universitas Katolik Parahyangan.
- Arifridho, Dandung. 2017. *Peran Organisasi Kepemudaan HMI terhadap Partisipasi Politik Anggota HMI di Bandar Lampung*.
- Nasiwan, Cholisin. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia.
- Djuyandi, Yusa. 2014. Efektifitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. *Jurnal Humaniora*. Vol. 5 No.2
- Dzakirin, Ahmad. 2011. *Tarbiyah Siyasah*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Friyanti, Fiska. 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gatara, Sahid. 2008. *Ilmu Politik (Memahami dan Menerapkan)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Haryanto. 2018. *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government.
- Hestiane, Cherlinda. 2019. *Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UIN Jakarta.
- Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- MD, Mahfud. 2010. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Mufti, Muslim. 2012. *Teori-Teori Politik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muttaqien, Amirul. 2021. Ulul Albab sebagai Pandangan Hidup Kader Hima Persis (Studi Fenomenologi Pemahaman Kader Hima Persis STAI Persis Bandung terhadap Ayat-Ayat Ulul Albab. *Jurnal Nasional*. Vol. 1. No. 2.
- Nababan, Rosma. 2019. Hubungan Sosialisasi Politik dengan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sumber. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 1. No. 2.
- Nasrullah, A. 2018. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refka Adtama.
- Peursen, Van C.A, Prof. Dr. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- PP Hima Persis. 2018-2020. *Merefleksikan Kiprah HIMA PERSIS dalam Mengelola Sumber Daya Kader HIMA PERSIS sebagai Khadimu Ummah yang Negarawan yang Ulama*. Naskah. Bandung: PP Hima Persis.
- QA-QD PP Hima Persis 2018-2021.
- Rush, Althoff. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali.
- Susilo, Sukidin, Basrowi. 2012. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Ah. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614 Telp. (022) 7811918 Fax. (022) 7811918

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : *Dirman Mulhatom Setia*
 NIM : *1198030066*
 PEMBIMBING I : *Dr. H. Hikmat, M. Ag.*
 PEMBIMBING II : *Dede Kurniasari, M. Ag.*
 TANGAL SK SKRIPSI : *23 Maret, 2023*
 JUDUL SKRIPSI : *peran OHP dalam sosialisasi politik pemilu 2024*
 NO. BLANKO : *4480*

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING	MATERI PEMBIMBING	TANDA TANGAN
1	<i>11/4-2023</i>	I	<i>SK</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>SK</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>12/6-23</i>	I	<i>Persepsi keadilan</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - III</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>15/6-2023</i>	I	<i>Definisi 'keadilan'</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - III</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>10/8-23</i>	I	<i>Simplifikasi</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - IV</i>	<i>[Signature]</i>
5		I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - IV</i>	<i>[Signature]</i>
6		I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - IV</i>	<i>[Signature]</i>
7		I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>Bab I - V</i>	<i>[Signature]</i>
8		I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		II	<i>keadilan</i>	<i>[Signature]</i>


DOC LAB
PEMBIMBING I
[Signature]
(Dr. Hikmat, M. Ag.)

Bandung,20.....
PEMBIMBING II
[Signature]
(Dede Kurniasari)

*Wajib Diisi Dan Diserahkan Saat Pendaftaran Sidang Skripsi

Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi

4482



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**
Nomor : B-804/Un.05/III.8/PP.00.9/3/2023

Tentang
**JUDUL DAN PEMBIMBING PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Menimbang : Bahwa Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menyetujui judul skripsi yang bersangkutan pada tanggal 23 Maret 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama No.77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-342/Un.05/I.1/PP.00.9/11/2018 Tentang Penetapan Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2018.
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-149/Un.05/I.1/PP.00.9/04/2019 Tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2019/2020.
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung 401/Un.05/II.2/Kp07.6/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Memperhatikan : Surat saudara **DIRMAN MUHAROM SETIA**, Nomor Pokok 1198030066, Tanggal : 15 Februari 2023 perihal pengajuan judul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TENTANG JUDUL DAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

Pertama : Mengesahkan Judul Skripsi:
PERAN ORGANISASI KERAKYATAN PEMUDA (OKP) DALAM SOSIALISASI POLITIK PEMILU 2024 (Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Pimpinan Pusat Hima Persis)

Atas Nama : **DIRMAN MUHAROM SETIA**
Nomor Pokok : **1198030066**
Jurusan : **Sosiologi**

Kedua : Mengangkat Saudara:
1. **Dr. H. Hikmat, M.Ag.**
2. **Dedeh Kurniasari, M.Ag.**
Sebagai Pembimbing Penulisan Skripsi tersebut

Ketiga : Pembimbing bertugas melakukan bimbingan penulisan skripsi sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

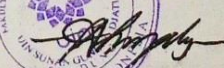
Keempat : Kepada Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;


Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus dalam ujian program Strata Satu (S-1);

Keenam : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Yth. Pembimbing Skripsi;
3. Yang bersangkutan

Bandung, 23 Maret 2023

Ditetapkan di
Dekan

Prof. Ahmad Ali Nurdin, Ph.D
NIP. 197305271998031001



Lampiran 3 Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. AH Nasution No.105 Bandung 40614 Telp. 022-7811918 Fax. (022) 7811918
 Website <http://fisipuinsgd.ac.id>

Nomor : B-1256/Un.05/III.8/PP.00.9/06/2023 Bandung, 19 Juni 2023
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara/
 Penyebaran Angket dan Data

Kepada Yth.
 Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat
 Jl. Pungkur No 31, Kecamatan Regol
 Kota Bandung Jawa Barat 40252

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati
 Bandung, dengan ini memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada :


Nama	: Dirman Muharom Setia
NIM	: 1198030066
Jurusan	: Sosiologi/Strata Satu (S1)
Semester /Th. Akademik	: VIII (Delapan) / 2022-2023

Yang bersangkutan akan mengadakan Penelitian pada
 Instansi/Lembaga/Perusahaan tersebut di atas, dan meminta data-data yang
 diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Moh. Dulkiah, M.Si
 NIP.197509242007101001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN SGD Bandung (sebagai laporan).

Lampiran 4 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian



**PIMPINAN WILAYAH
HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM
JAWA BARAT**

Jl. Pungkur Gg. Muncang No. 31 Kec. Regol Kel. Pungkur Bandung, Jawa Barat
Kode Pos: 40252 –No Telp: 089629765392
Email: himapersisjabar@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 150/C/PWHIMAPERSISJABAR/VIII/2023

PW Hima Persis Jawa Barat dengan ini menerangkan atas nama :

Nama : Dirman Muharom Setia
NIM : 1198030066
Universitas : UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jurusan : Sosiologi
Semester : 8

Telah melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi kepada Pengurus/Tasykil PW Hima Persis Jawa Barat.

Dengan Judul Skripsi "*Peran OKP dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan PW Hima Persis Jawa Barat)*".

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Bandung, 01 Agustus 2023

Ketua PW Hima Persis Jawa Barat



Amirul Muttaqin, S.Ag

Lampiran 5 Surat Bukti Telah Melakukan Penelitian

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1101 /HM.04/32/2023

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan ini menerangkan:

Nama : Dirmam Muharom Setia
NIM : 1198030066
Jurusan : Sosiologi
Semester : 8
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Telah melakukan penelitian dengan wawancara ke KPU Provinsi Jawa Barat dengan judul skripsi " Peran OKP dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024 (Studi Tentang Pemikiran dan Gerakan Hima Persis)"



Lampiran 6 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Amirul Muttaqien	Ketua PW Hima Persis Jabar
2	Yanuar	Bid. Politik Kebijakan Publik
3	Ilham Nur Hidayatullah	Ketua Umum PP Hima Persis
4	Ridwan Rustandi	Tokoh Masyarakat/Aktivis
5	Reza	KPU Jawa Barat
6	Kholfan Faiz Mufidi	Kader Hima Persis Kotban



Lampiran 7 Pedoman Wawancara

NO	Rumusan Masalah	Parameter/Indikator	Pertanyaan	Objek
1		Grand Design dan Visi Misi dari Ketua Umum Hima Persis	<p>Ditujukan untuk Ketua Umum Hima Persis dan Ketua Umum Hima Persis Jawa Barat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai ketua umum, bagaimana Anda mendefinisikan Sosialisasi Politik yang dilakukan OKP? 2. Menurut Anda apakah Sosialisasi Politik berperan penting dalam membentuk sikap politik seseorang? 3. Bagaimana pengalaman Sosialisasi Politik Anda? Apakah ada pengaruh signifikan dalam membentuk pandangan politik Anda sebagai ketua? 4. Sebagai salah satu OKP di Indonesia, bagaimana pemikiran dan gerakan Hima Persis terkait dengan Pemilu 2024? 5. Apakah ada perbedaan dalam Sosialisasi Politik 	Ketua Umum Hima Persis dan Ketua Hima Persis Jawa Barat, KPU, Tokoh Masyarakat/Aktifis, dan Kader Hima Persis yang Aktif.

			<p>antara Hima Persis yang sekarang dengan Hima Persis periode sebelumnya?</p> <p>6. Bagaimana proses Sosialisasi Politik yang dilakukan Hima Persis kepada para kadernya? Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan?</p> <p>7. Apakah Hima Persis terlibat dalam kampanye politik atau aktivitas politik lainnya? Apakah hal tersebut mempengaruhi Sosialisasi Politik terhadap para kadernya?</p> <p>8. Apa tujuan utama dari sosialisasi politik terkait pemilu 2024 yang dilakukan Hima Persis?</p> <p>9. Bagaimana Hima Persis memastikan bahwa pesan-pesan sosialisasi politik pemilu 2024 dapat sampai kepada para kadernya secara efektif?</p> <p>10. Bagaimana implikasi Hima Persis dengan Politik secara umum?</p> <p>Ditujukan untuk KPU dan Tokoh Masyarakat</p>	
--	--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Anda memandang peran OKP dalam Sosialisasi Politik Pemilu 2024?2. Menurut Anda apa pentingnya Sosialisasi Politik yang dilakukan dalam konteks Pemilu 2024?3. Apa jenis kegiatan atau metode yang menurut Anda efektif digunakan oleh OKP dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat terkhusus kepada para kadernya?4. Bagaimana Anda melihat dampak Sosialisasi Politik yang dilakukan OKP terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024?5. Apakah Anda memiliki pengalaman pribadi atau pengamatan tentang Sosialisasi Politik yang dilakukan OKP?6. Apa tanggapan Anda terhadap upaya OKP dalam meningkatkan	
--	--	--	---	--

			<p>pengetahuan politik dan kesadaran masyarakat dan kadernya tentang Pemilu 2024 melalui Sosialisasi Politik?</p> <p>7. Bagaimana menurut Anda OKP dapat lebih efektif dalam menyampaikan pesan politik dan membangun kesadaran politik masyarakat dan kadernya jelang Pemilu 2024?</p> <p>8. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Sosialisasi Politik yang dilakukan OKP menjelang Pemilu 2024?</p> <p>Ditujukan untuk kader atau anggota Hima Persis yang aktif</p> <p>1. Sebagai kader Hima Persis, bagaimana Anda melihat peran Hima Persis dalam melakukan Sosialisasi Politik di kalangan mahasiswa khususnya para kader?</p>	
--	--	--	---	--

			<p>2. Apakah Hima Persis memberikan ruang bagi para kader untuk berdiskusi dan mengkaji tentang isu-isu politik?</p> <p>3. Bagaimana kader Hima Persis mengaplikasikan pemahaman politik yang diperoleh melalui Sosialisasi Politik Hima Persis?</p> <p>4. Bagaimana Hima Persis mendorong partisipasi aktif kader dalam pemilu 2024? Apakah ada kegiatan khusus atau inisiatif khusus yang dilakukan?</p>	
2	<p>Bagaimana pemikiran Hima Persis terkait dengan Sosialisasi Politik Pemilu 2024?</p> <p>Bagaimana Gerakan Hima Persis terkait dengan Sosialisasi Politik Pemilu 2024?</p>	<p>Program Kerja, Rencana, Kegiatan dari Bidang Politik Kebijakan Publik (Hima Persis)</p>	<p>1. Apakah Hima Persis memiliki rencana, program atau kegiatan khusus yang bertujuan untuk Sosialisasi Politik terkait dengan Pemilu 2024 untuk para kader?</p> <p>2. Apakah Hima Persis memberikan pengetahuan dan pemahaman politik kepada kadernya?</p>	<p>Bidang terkait dengan Politik di OKP Hima Persis, dalam hal ini Politik dan Kebijakan Publik.</p>

			<p>Bagaimana cara penyampaiannya?</p> <p>3. Bagaimana Hima Persis berpartisipasi dalam pemilu? Apakah Hima Persis memberikan dorongan atau dukungan kepada kader untuk berpartisipasi dalam Pemilu?</p> <p>4. Apakah Hima Persis bekerja sama dengan organisasi lain, lembaga, pemerintah dan lain-lain untuk mengadakan kegiatan Sosialisasi Politik?</p> <p>5. Bagaimana Hima Persis merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Politik terkait Pemilu 2024? Apa saja metode atau pendekatan yang digunakan?</p> <p>6. Apakah Hima Persis memberikan panduan atau materi edukatif kepada kadernya terkait calon-calon atau isu-isu politik yang relevan dengan pemilu 2024?</p>	
--	--	--	---	--

			<p>7. Bagaimana Hima Persis mengukur keberhasilan dari program Sosialisasi Politik pemilu 2024 yang dilakukan? Apakah ada indikator atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur dampaknya?</p>	
--	--	--	--	--



Lampiran 8 Dokumentasi



Wawancara dengan Ketua Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat,
Amirul Muttaqien.



Wawancara dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Hima Persis,
Ilham Nur Hidayatullah.



Wawancara dengan Yanuar N, Koordinator Bid. Politik dan Kebijakan Publik
Pimpinan Wilayah Hima Persis Jawa Barat.



Wawancara dengan Ridwan Rustandi, seorang Tokoh Masyarakat/Aktivist.



Wawancara dengan Pak Reza, anggota KPU Jawa Barat divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih



Wawancara dengan Kholfan Faiz Mufidi,
Kader Aktif Pimpinan Daerah Hima Persis Kota Bandung.